



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


bpspldenpasar

 (0361) 479 4821
 kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar



**BPSPL
DENPASAR**
#DjprlMengejolaLaut

#2024
KKP BEYOND

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepadaNya dan berkhidmat kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk khidmat kita kepada Negara ini, adalah diterbitkannya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2024 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPSPL Denpasar selama Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan BPSPL Denpasar selama Triwulan I Tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Ditjen PRL diucapkan terima kasih.

Gianyar, 29 April 2024

Kepala BPSPL Denpasar



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Getredha Melsina Hehanussa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2024 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Triwulan I tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024. Pada pelaporan LKj Triwulan I tahun 2024, data capaian dan target BPSPL Denpasar telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDJPKRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja (IK) yang dapat diukur pada Triwulan I tahun 2024 adalah IK 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 1 dokumen dan capaian 1 dokumen; IK 18 Presentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) dengan target 94 dan capaian 133,33; IK 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasa lingkup BPSPL Denpasar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 80 dan

capaian 100.

Total pagu anggaran BPSPL Denpasar tahun 2024 saat ini sebesar Rp16.435.987.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp14.510.987.000,- dan PNBPNP Rp1.925.000.000,- termasuk dana blokir sejumlah Rp200.000.000,- yang berasal dari jenis belanja 52 (belanja barang) sehingga pagu bersih yang dapat digunakan sebesar Rp16.235.987.000,00. Total realisasi sampai dengan Triwulan I (Per 31 Maret 2024) tahun 2024 sebesar Rp3.357.819.655,- (20,68%).

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum pada perjanjian kerja. Hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2024 adalah 115,00% yang berkategori baik dengan ditandai warja hijau pada aplikasi kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.4 Organisasi	4
1.5 Kepegawaian.....	5
1.6 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ..	8
1.7 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	18
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
IKU 1. Meningkatkan Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp .000)	33
IKU 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang).....	35
IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	38
IKU 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah) ..	48
IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan).....	51
IKU 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	53
IKU 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian baru (Kelompok)	56

IKU 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyardartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis).....	58
IKU 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutak di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	71
IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	78
IKU 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (kawasan).....	81
IK 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar.....	83
IK 13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	86
IK 14. Nilai Unit Kinerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai).....	88
IK 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	90
IK 16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93
IK 17. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen).....	96
IK 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).....	98
IK 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	99
IK 20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	101
IK 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	102
IK 22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).....	105
3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	106
3.3 Realisasi Anggaran.....	108
BAB IV PENUTUP	111
4.1 Kesimpulan.....	111
4.2 Rekomendasi	112
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja	5
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	9
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	10
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	11
Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar 2020-2024	21
Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024.....	26
Tabel 8. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2024	30
Tabel 9. Capaian IKU 1 BPSPL Denpasar TW I	33
Tabel 10. <i>Capaian IKU 2 BPSPL Denpasar TW I</i>	35
Tabel 11. <i>Kegiatan Pendukung IKU 2</i>	37
Tabel 12. Realisasi Anggaran IKU 2	38
Tabel 13. Capaian IKU 3 BPSPL Denpasar TW I.....	38
Tabel 14. Kegiatan Pendukung IKU 3	46
Tabel 15. Realisasi Anggaran IKU 3	48
Tabel 16. <i>Kegiatan Pendukung IKU 2</i>	50
Tabel 17. Realisasi Anggaran IKU 2	50
Tabel 18. <i>Kegiatan Pendukung IKU 5</i>	52
Tabel 19. Realisasi Anggaran IKU 5	53
Tabel 20. Capaian IKU 6 BPSPL Denpasar TW I.....	54
Tabel 21. <i>Kegiatan Pendukung IKU 6</i>	55
Tabel 22. Realisasi Anggaran IKU 6	56
Tabel 23. Capaian IKU 7 BPSPL Denpasar TW I.....	56
Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU 7	58
Tabel 25. Capaian IKU 8 BPSPL Denpasar TW I.....	59
Tabel 26. <i>Rekap kejadian respon cepat BPSPL Denpasar hingga Triwulan I</i> 66	
Tabel 27. Kegiatan Pendukung IKU 8.....	67
Tabel 28. Realisasi Anggaran IKU 8	71
Tabel 29. Capaian IKU 9 BPSPL Denpasar TW I.....	72
Tabel 30. Kegiatan Pendukung IKU 9	76
Tabel 31. Realisasi Anggaran IKU 9	78
Tabel 32. Capaian IKU 10 BPSPL Denpasar TW I.....	78
Tabel 33. Kegiatan Pendukung IKU 10.....	80
Tabel 34. Realisasi Anggaran IKU 10.....	80
Tabel 35. Capaian IKU 11 BPSPL Denpasar TW I.....	81
Tabel 36. Kegiatan Pendukung IKU 10.....	82
Tabel 37. Realisasi Anggaran IKU 10	83
Tabel 38. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	84
Tabel 39. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar TW I.....	84
Tabel 40. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar TW I.....	86
Tabel 41. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar TW IV	89
Tabel 42. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar TW I.....	91

Tabel 43. Realisasi Anggaran IK 15.....	93
Tabel 44. Kategori nilai PM SAKIP.....	93
Tabel 45. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar TW I.....	95
Tabel 46. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar TW I.....	97
Tabel 47. Capaian IK 18 BPSPL Denpasar TW I.....	98
Tabel 48. Capaian IK 19 BPSPL Denpasar TW I.....	100
Tabel 49. Capaian IK 20 BPSPL Denpasar TW I.....	101
Tabel 50. Capaian IK 21 BPSPL Denpasar TW I.....	103
Tabel 51. Capaian IK 22 BPSPL Denpasar TW I.....	105
Tabel 52. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2024.....	106
Tabel 53. <i>Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2024</i>	109

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2024	6
Grafik 2. Perincian Tenaga Kontrak (PPNPN) BPSPL Denpasar TA 2024	6
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 2024	7
Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2024.....	7
Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2024	8
Grafik 6. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Februari Tahun 2024 di Probolinggo.....	62
Grafik 7. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Maret Tahun 2024 di Probolinggo.....	63
Grafik 8. Diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus per periode waktu di Probolinggo.....	63
Grafik 9. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Februari Tahun 2024 di Situbondo	64
Grafik 10. Diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus per periode waktu di Situbondo.....	64
Grafik 11. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Maret Tahun 2024 di Situbondo.....	65
Grafik 12. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari Triwulan I.....	74
Grafik 13. Jumlah Rekomendasi SAA Triwulan I	75
Grafik 14. Jumlah Rekomendasi Teripang Triwulan I.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar.....	4
<i>Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar.....</i>	30
Gambar 3. Peta lokasi monitoring hiu paus tahun 2024	62
Gambar 4. Peta prediksi sebaran kemunculan Hiu Paus Tahun 2024 di Situbondo.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Triwulan I Tahun 2024.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008. Secara khusus UPT ini adalah mengawal UU No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta turunannya dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta turunannya. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

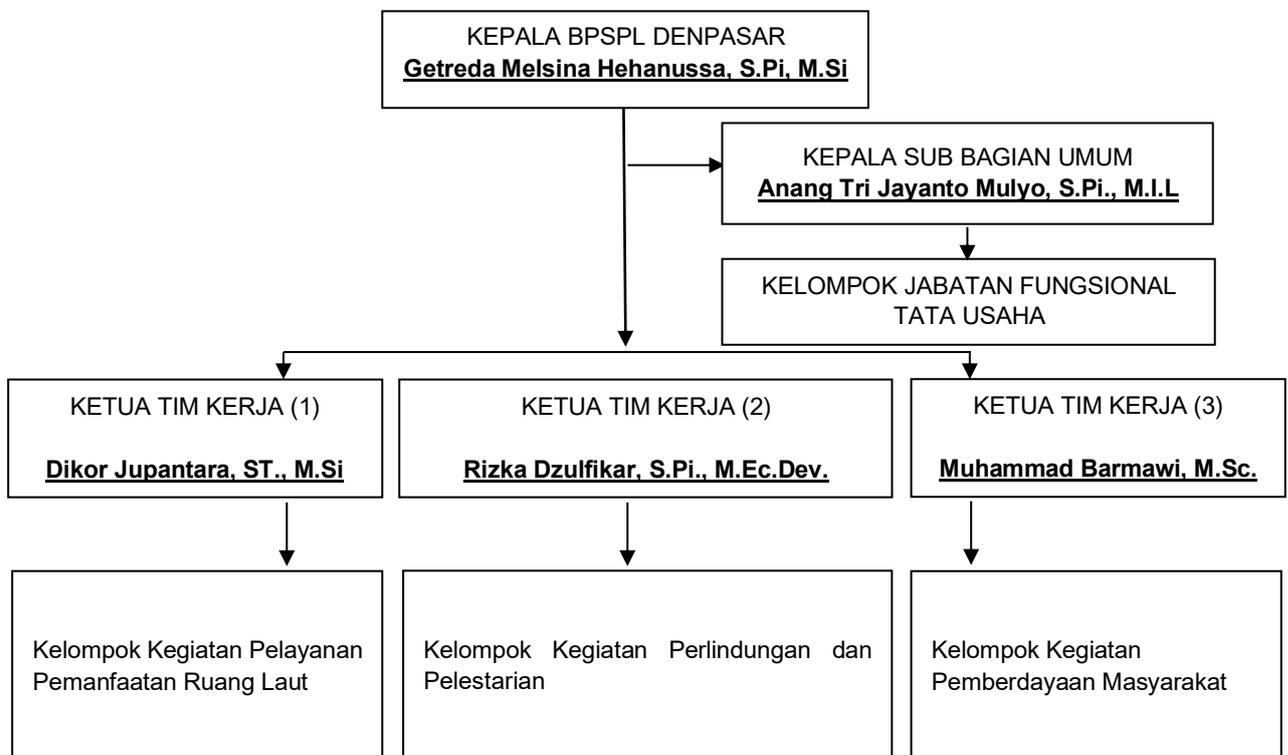
Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Denpasar secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- 3) Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
- 4) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah, termasuk kerja sama regional seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF);
- 5) Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;

- 7) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.4 Organisasi

Struktur Organisasi BPSPL Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar

Dalam struktur organisasi BPSPL Denpasar, terdapat 3 bagian utama, yaitu:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BPSPL.
- 2) Ketua Tim Kerja (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut.
- 3) Ketua Tim Kerja (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Jenis Ikan, Kawasan Konservasi, Kemitraan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- 4) Ketua Tim Kerja (3) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, KOMPAK dan Gerakan Bersih Pantai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSPL Denpasar dibantu 3 Satuan Kerja (Satker) yang mana pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Satker Surabaya, Satker Mataram dan Satker Kupang.

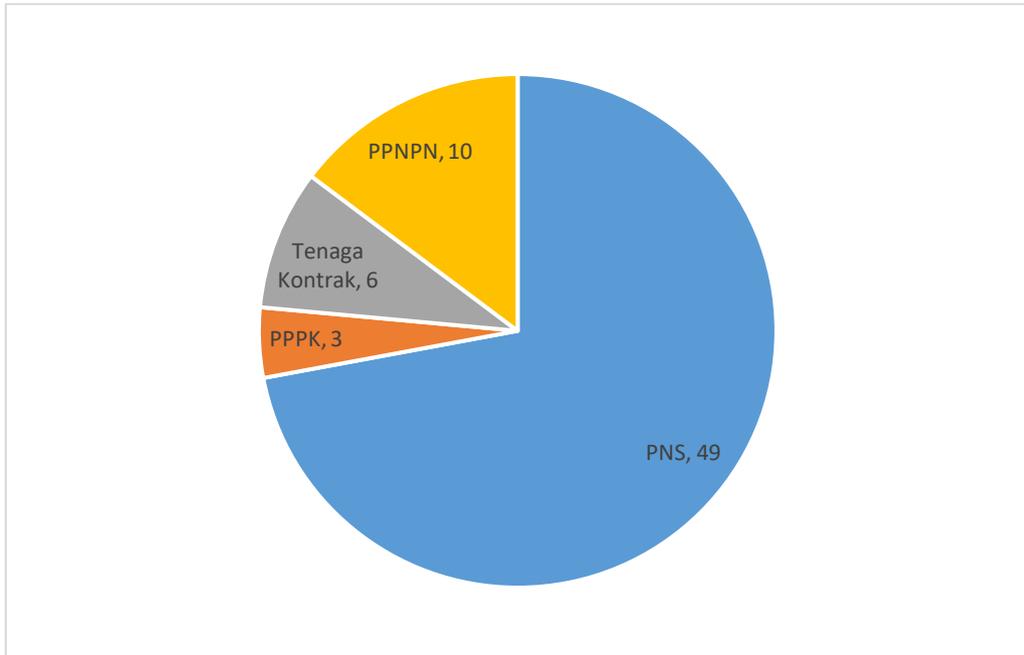
Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja

No	Nama Satker	Koordinator	Wilayah Kerja
1.	Satker Surabaya	Suwardi, S.T., M.Si	Provinsi Jatim
2.	Satker Mataram	Muhammad Barmawi, M.Sc	Provinsi NTB
3.	Satker Kupang	Sri Pratiwi Saraswati Dewi, S.Pi	Provinsi NTT
4.	Pos Pelayanan Banyuwangi	Dewi Retnoningrum, S.Pi	Provinsi Jatim

1.5 Kepegawaian

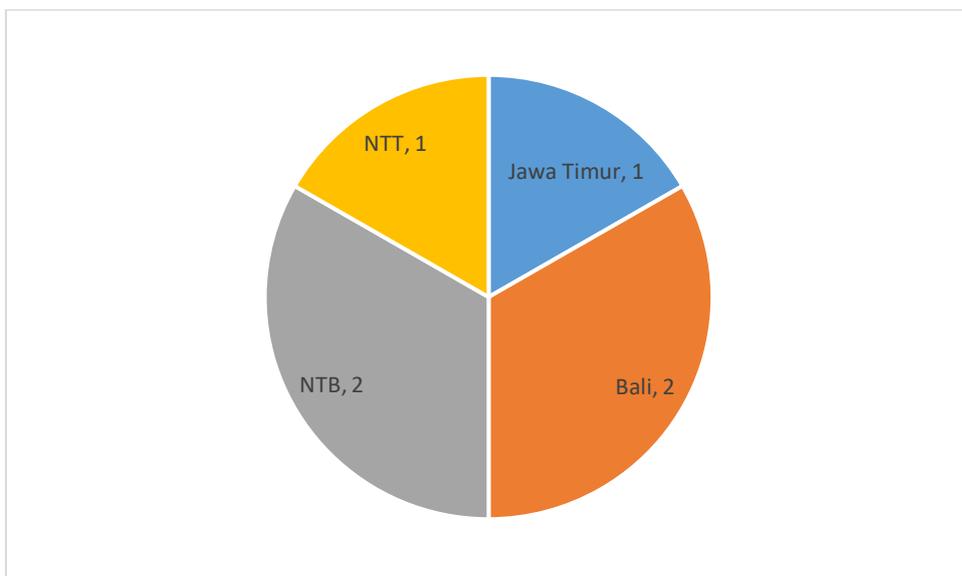
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kontrak pada tahun 2024 sebanyak 68 orang terdiri dari 49 PNS, 3 PPPK, 6 Tenaga Kontrak, dan 10 PPNP. Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2024



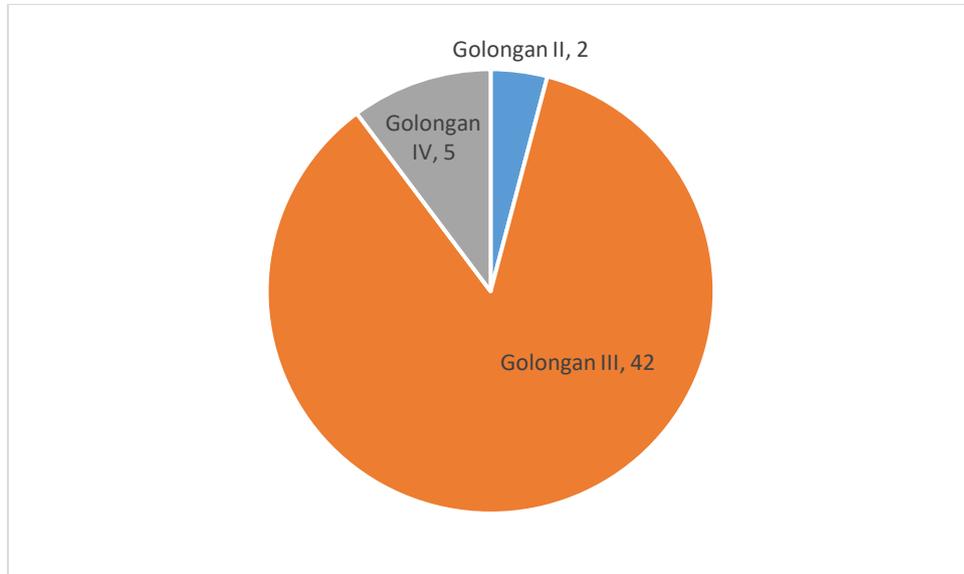
Adapun perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 3 orang yang kesemuanya berada di Wilker Bali. Sedangkan perincian tenaga kontrak atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) kesemuanya berjumlah 6 orang yang tersebar di Wilker Jawa Timur 1 orang, Wilker NTB 2 orang, Wilker NTT 1 orang dan Wilker Bali 2 orang. Secara rinci ditampilkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2. Perincian Tenaga Kontrak (PPNPN) BPSPL Denpasar TA 2024



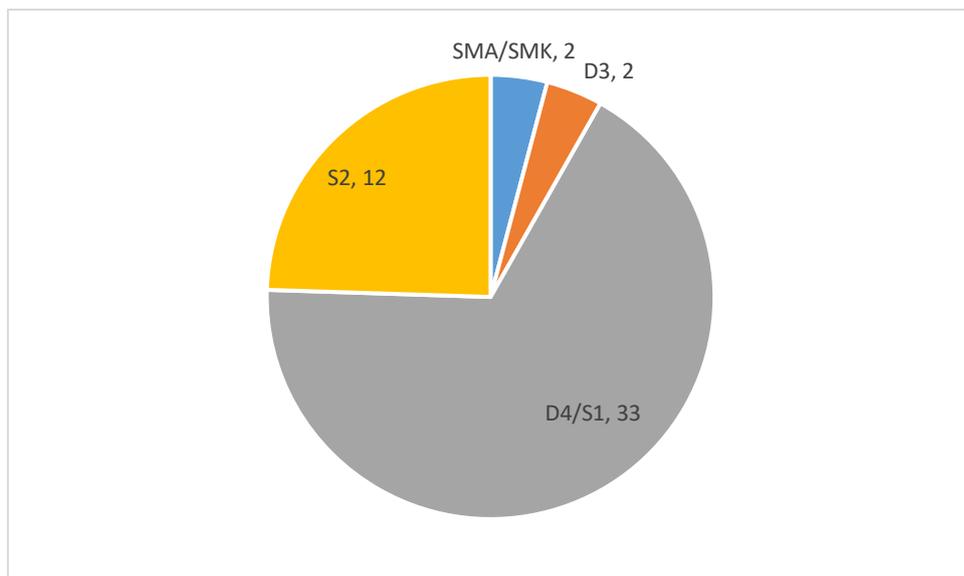
Sedangkan komposisi PNS berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 2024



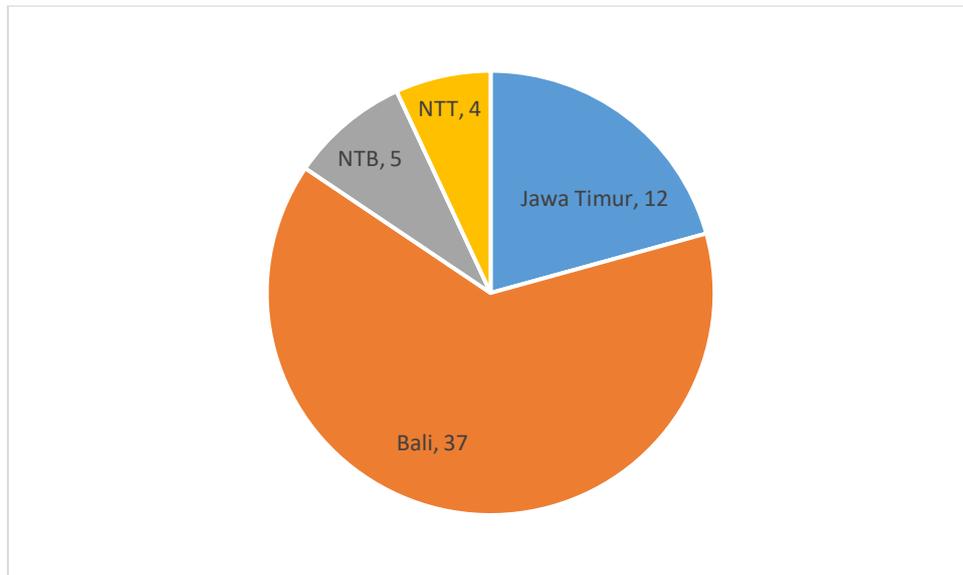
Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Denpasar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Denpasar. Untuk komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 4 sebagai berikut.

Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2024



Selain tingkat pendidikan, penempatan SDM merupakan faktor yang penting dalam mencapai sasaran strategis BPSPL Denpasar yang telah ditetapkan, mengingat BPSPL Denpasar memiliki 4 kantor satker di Surabaya, Mataram dan Kupang. Berikut distribusi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak BPSPL Denpasar.

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2024



1.6 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

A. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera

dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “*services*” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha)
1	Sulawesi	862,627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)

- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)
- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPSPL Denpasar melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan KOMPAK berupa alat monitoring. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di seluruh wilayah kerja.

Pada sektor pemanfaatan jasa kelautan, wilayah kerja BPSPL Denpasar menyimpan potensi garam (Kab Tuban, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan), biofarmakologi, dan desa wisata bahari. Potensi tersebut tersebar di seluruh wilayah BPSPL Denpasar dan perlu dilakukan identifikasi agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nangu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020
17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyutatar Sepang-Lunyuk	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

- a. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
- b. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
- c. Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
- d. Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

B. Permasalahan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi
2. Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
3. Pemanfaatan jenis ikan khususnya Hiu dan Pari masih tinggi dan merupakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wilayah

kerja BPSPL Denpasar merupakan pintu ekspor Hiu dan Pari dengan jumlah dokumen sebanyak 2.412 dokumen sejak tahun 2017 – 2019 baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini BPSPL Denpasar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi terkait pemanfaatan jenis ikan. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur PNBP.

4. Belum adanya keseragaman data series keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar. Perlu adanya metode dan standard yang dibuat untuk pendataan.
5. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, pemanfaatan kayu mangrove sebagai bahan baku arang serta maraknya alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove. Perlunya identifikasi lahan mangrove untuk direhabilitasi kembali.
6. Permasalahan terkait terumbu karang yaitu ditemukannya kelompok kapal penangkapan ikan yang melabuhkan jangkarnya di sekitar terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Terjadinya kasus penyakit pada terumbu karang yaitu pemutihan karang di Buleleng, Sanur, munculnya hama/predator. Perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala untuk menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya kerusakan karang.
7. Aktivitas nelayan yang menambat kapal di sekitar padang lamun menyebabkan lamun dapat tergerus lunas kapal, selain itu ancaman tumpahan minyak hasil buangan kapal serta banyaknya suplai sedimen atau lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang bermuara ke laut yang dapat menyebabkan penempelan pada lamun yang dikhawatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme.
8. Aktivitas destructive fishing yang masih terjadi di beberapa perairan di Wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.

9. Pengelolaan sektor garam yang masih terus digalakkan dengan permasalahan rendahnya kualitas garam konsumsi melalui program Peningkatan kualitas garam konsumsi, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan lahan integrasi pegaraman dan sistem tunnel garam. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan usaha garam.
10. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.
11. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
12. Terdapat beban kerja yang sangat tinggi dan permasalahan yang kompleks terkait pengelolaan ruang laut di Jawa Timur. Perlunya penataan organisasi dengan pembentukan UPT di Jawa Timur.

1.7 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2023 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Triwulan I Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2024.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Adapun Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menuangkan visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam visi misi Ditjen PRL. Kemudian BPSPL Denpasar di bawah Ditjen PRL menyusun pula visi misi yang sinergis untuk mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan dapat

direviu sesuai aturan yang berlaku. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Sebagai tindak lanjut dari visi dan arahan Presiden, maka disusun Renstra KKP 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020. Adapun visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden meliputi (1) “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”; (2) “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”; (3) “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan (4) “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Untuk mendukung Renstra KKP 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 01 Tahun 2021. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya visi KKP”. Adapun misi DJPRL meliputi (1) Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil; dan (3)

Peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL. Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Dtjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PRL 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran “Kesejahteraan petambak garam meningkat”
 - b. Sasaran “Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat”
 - c. Sasaran “Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan”
 - d. Sasaran “Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat”
 - e. Sasaran “Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT”
 - f. Sasaran program “Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisioal, dan masyarakat local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan diKatkan kelembagaannya”
 - g. Sasaran “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”
 - b. Sasaran “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”
 - c. Sasaran “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali”
 - d. Sasaran “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”.
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Sasaran “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PRL”.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPRL, BPSPL Denpasar memiliki tugas untuk mendukung sasaran strategis DJPRL. Visi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL“, sedangkan penjabaran misi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah: (1)

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (2) Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (3) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (4) Perencanaan Ruang Laut di Wilayah BPSPL Denpasar; (5) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan di lingkup BPSPL Denpasar.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan pengelolaan ruang laut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- 4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya hayati, non hayati dan buatan;
- 5) Melestarikan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman haya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka BPSPL Denpasar telah menyusun Program beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja BPSPL Denpasar 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Ha)	6.379,27	20.767,11	20.767,11	20.767,11	20.767,11
2	Meningkatnya pengelolaan	2	Jenis ikan terancam punah	5	5	5	5	5

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar		yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)					
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	6	6	6	6
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	1	4	4	4	4
		5	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1	1	1	1	1
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	10	10	10	10	10
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	10	10	10	10	10
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja Denpasar	9	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan /atau fasilitas dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	1	0	1	1	1
7	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar	10	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	0	0	0	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
8	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	11	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1
9	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Denpasar	12	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (unit)	4	0	1	1	1
10	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	13	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1
11	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Denpasar	14	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
12	Meningkatnya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	15	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja BPSPL Denpasar (lokasi)	0	0	0	1	1
13	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar	16	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (pulau)	0	0	0	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
14	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Denpasar	17	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	0	72,5	72,5	72,5	72,5
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (indeks)	72	73	74	75	76
		19	Nilai WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	72	76	76	78	78
		20	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Denpasar (%)	90	91	91	92	92
		21	Persentase unit kerja BPSPL Denpasar yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		22	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)	88	89	89	90	90
		24	Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	85	86	87	88	89
		25	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BPSPL Denpasar 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemik global covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan dinamika kebijakan lainnya yang dapat muncul atau berubah pada kurun waktu 2020-2024.

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), BPSPL Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 25 Januari 2024, saat ini pada triwulan I tahun 2024 terdapat sebelas (11) sasaran kegiatan dan dua puluh dua (22) indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Denpasar.

Pagu anggaran BPSPL Denpasar pada awal tahun 2024 adalah Rp16.435.987.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp14.510.987.000,- dan PNBPNP Rp1.925.000.000,- termasuk dana blokir sejumlah Rp200.000.000,- yang berasal dari jenis belanja 52 (belanja barang) sehingga pagu bersih yang dapat digunakan sebesar Rp16.235.987.000,00. Total realisasi sampai dengan Triwulan I (Per 31 Maret 2024) tahun 2024 sebesar Rp3.357.819.655,- (20,68%).

Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Denpasar	1.	Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp.000)	950.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Orang)	160
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5

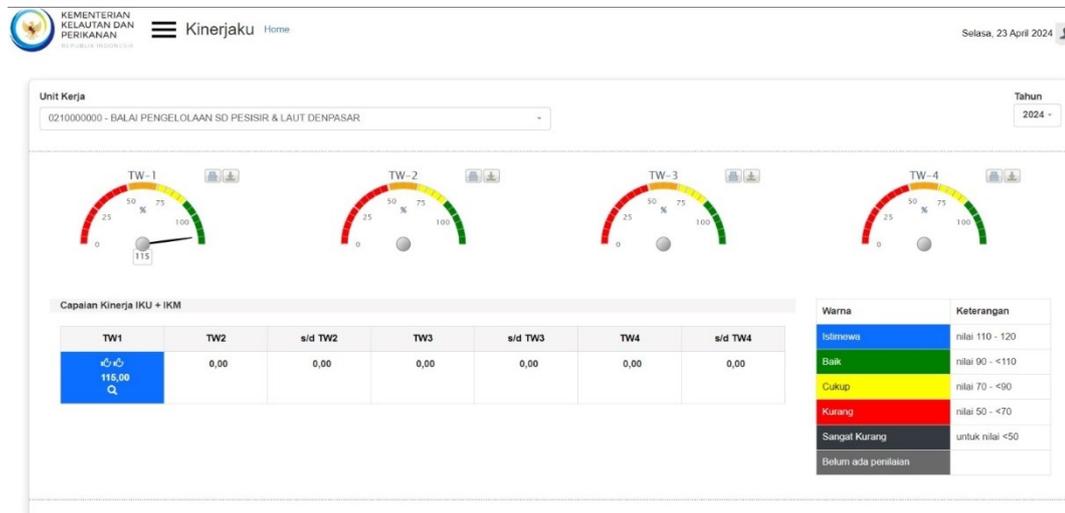
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10.	Pemanfaatan air laut selain energi yang Identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	80
		22.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	70

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BPSPL Denpasar terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja (IK). Pada Triwulan I Tahun 2024 Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM diperoleh nilai 115,00 (istimewa).



Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar

Tabel 8. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET	REALISASI	%KINERJAKU
IKU 1	Meningkatnya Nilai PNBSP BPSPL Denpasar (Rp. 000)	Tahunan	950.000	-	-	-
IKU 2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	Tahunan	160	-	-	-
IKU 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	3	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET	REALISASI	%KINERJAKU
IKU 4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	Tahunan	2	-	-	-
IKU 5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	Tahunan	1	-	-	-
IKU 6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	Tahunan	1	-	-	-
IKU 7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	Tahunan	1	-	-	-
IKU 8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan Penyadartahuan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penganganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahunan	6	-	-	-
IKU 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahunan	5	-	-	-
IKU 10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahunan	1	-	-	-
IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	Tahunan	2	-	-	-
IK 12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	93,76	-	-	-
IK 13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
IK 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET	REALISASI	%KINERJAKU
IK 15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	88	-	-	-
IK 16	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	81	-	-	-
IK 17	Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4	1	1	100
IK 18	Presentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	Tahunan	94	94	133,33	120
IK 19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Tahunan	80	80	100	120
IK 20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahunan	100	-	-	-
IK 21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahunan	80	-	-	-
IK 22	Nilai Pengawasan Internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	Tahunan	70	-	-	-

IKU 1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp .000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Denpasar adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya

Teknik menghitung PNBP BPSPL Denpasar dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$PNBP_{BPSPL\ Denpasar} = SAJI\ DN + Rekomendasi\ DN + Rekomendasi\ LN + Denda$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan atas dokumen Saji DN 1) + pungutan perdagangan + pungutan pengambilan 2)

Surat Rekomendasi = pungutan atas dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut

keterangan :

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan :

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNBP x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

Tabel 9. Capaian IKU 1 BPSPL Denpasar TW I

SK 1	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar							
	IKU 1 Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp .000)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	950.000	-	-	-	950.000	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan sampai dengan 31 Maret 2024 tercapai 85,81%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Tidak terdapat Target IKU 1 pada Triwulan I 2023 maupun Triwulan I 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Tidak terdapat target IKU Penerimaan PNBPN berdasarkan Renstra 2020-2024, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara terus menerus telah dilakukan penarikan PNBPN dan penginputan nilai PNBPN yang diperoleh sehingga dapat mencapai atau melebihi target pada akhir tahun.

b. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dilakukan adalah dengan menugaskan pegawai di wilayah kerja untuk melakukan input PNBPN.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah melakukan penginputan PNBPN melalui aplikasi E-SAJI. Sejak tanggal 18 September 2021 BPSPL Denpasar telah melakukan penarikan PNBPN terhadap produk pemanfaatan jenis ikan. Adapun total penarikan PNBPN yang telah dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar di seluruh wilayah selama Triwulan I tahun 2024 adalah Rp. 815.200.536,- dari target Rp950.000.000,- (85,81%)

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 1 adalah Melanjutkan kegiatan penarikan PNBPN terhadap produk pemanfaatan jenis ikan pada bulan berikutnya.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU 1 Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp.000).

IKU 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)

Gerakan Cinta Laut merupakan suatu gerakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat secara umum untuk bersama sama menjaga laut dan diharapkan dapat memulihkan ekonomi nelayan yang tidak melaut sehingga tidak terjadi ketimpangan atau beralih profesi nelayan ke profesi lainnya.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 10. *Capaian IKU 2 BPSPL Denpasar TW I*

SK 2	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	160	-	-	-	160	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Tidak terdapat Target IKU 2 pada Triwulan I 2023 maupun Triwulan I 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Tidak terdapat target IKU 2 berdasarkan Renstra 2020-2024, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah dilakukan identifikasi awal dan koordinasi pelaksanaan Gerakan Bulan Cinta Laut.

d. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.

d. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilakukan karena kegiatan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Rapat koordinasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Tahun 2024 di Bandung tanggal 23-24 Januari 2024
2. Survei awal calon lokasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Pasuruan, Situbondo, Denpasar, dan Kab. Lombok Timur

Tabel 11. Kegiatan Pendukung IKU 2

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	
2	Survei awal calon lokasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	 <p>Mar 5, 2024 09:39:24 7.6107S 112.8276E Raci Kecamatan Bangil Pasuruan Jawa Timur</p>  <p>Kecamatan Panarukan, Jawa Timur, Indonesia 8W3Q+CGH, Kilensari, Kec. Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68351, Indonesia Lat: -7.698492° Long: 113.93899° 13/03/24 12:29 PM GMT +07:00</p>   <p>28 Mar 2024 11:25:20 8-77806078S 116-5127322E 113.4 SE Tanjung Luar Kerayu Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat</p>

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 2 adalah melanjutkan persiapan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 12. Realisasi Anggaran IKU 2

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Geraan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	400.000.000	17.651.165	4,41

IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Terdapat tiga kegiatan pendukung untuk pemenuhan IKU 3 BPSPL Denpasar yaitu kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut, dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen sosialisasi, verifikasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 13. Capaian IKU 3 BPSPL Denpasar TW I

SK 3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	3	-	-	-	3	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Tidak terdapat target pada Triwulan I 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Tidak terdapat Target IKU 3 dalam Renstra 2020-2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu dilaksanakan *coaching clinic* dan bimbingan teknis kesesuaian kegiatan ruang laut pada bulan Maret, monitoring pemanfaatan ruang laut di Bali dan Jawa Timur, dan verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut pada Bulan Januari sejumlah 15 permohonan, Februari 14 permohonan, dan Maret 28 permohonan.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang laut, yaitu :

- Beberapa permasalahan *coaching clinic* masih tidak bisa diputuskan secara langsung oleh BPSPL Denpasar
- Proses penerbitan izin masih tergolong lama

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- Melakukan koordinasi dengan DKP Provinsi Bali dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut
- Koordinasi dengan Direktorat PRL terkait perkembangan dan penggunaan e-sea

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, tenaga ahli, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Sosialisasi pemanfaatan ruang laut antara lain Coaching Clinic Keksesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. *Coaching clinic* dilakukan pada Bulan Januari kepada sembilan perusahaan. Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan pada 5-6 Maret 2024 di Hotel Grand Palace Denpasar.

2. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Verifikasi kesesuaian ruang laut dilaksanakan sebagai Tindakan preventif dan pengendalian terhadap segala aktivitas pemanfaatan ruang laut yang sedang dimohonkan status izinnya. Adapun rincian jumlah dan hasil penilaian teknis berdasarkan kategori kegiatan yang telah dilakukan di wilayah kerja BPSPL Denpasar pada triwulan I adalah sebagai berikut:

a. Januari

No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kategori	Kegiatan	Panjang/Luasan (Hektar)
1	Bali	4 January 2024	PT Dinar Darum Lestari	Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.47
2	Bali	4 January 2024	PT Dinar Darum Lestari	Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.47
3	Jawa Timur	29 January 2024	CV Xagara Mandala	Desa Badena, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.12
4	Jawa Timur	29 January 2024	PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera	Desa Selokanyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.22

No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kategori	Kegiatan	Panjang/Luasan (Hektar)
5	Jawa Timur	29 January 2024	UD Sabar Rejeki Lancar	Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.19
6	Jawa Timur	29 January 2024	PT Anugerah Tanjung Gumukmas	Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.005
7	Bali	30 January 2024	PT Tirta Samudra Bali	Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.19
8	Bali	30 January 2024	PT Tirta Samudra Bali	Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.38
9	Bali	30 January 2024	PT Suri Tani Pemuka	Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.18
10	Bali	30 January 2024	PT Prima Larvae	Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.10
11	Bali	30 January 2024	PT Awahita Samudra Nusantara	Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung	Wisata Bahari	Wisata Bahari	1.07
12	Bali	31 January 2024	PT Utama Terus Jaya Makmur	Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.98
13	Bali	31 January 2024	PT Nusa Lautan Rejeki	Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.05
14	Bali	31 January 2024	PT Kona Bay Indonesia	Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.18
15	Bali	31 January 2024	PT Tirta Bintang Timur	Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung	Wisata Bahari	Pembangunan Terminal Khusus	1.19

b. Februari

No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kategori	Kegiatan	Panjang/Luasan (Hektar)
1	NTB	1 February 2024	PT Kosambi Victorylac	Desa Bilok Bitung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.74
2	NTB	1 February 2024	CV Niaga Bahari	Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.12
3	NTB	1 February 2024	PT Maximus Shrimp Farm	Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.47
4	NTT	1 February 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao	Rehabilitasi	Peneggelaman Rumah Ikan	0.25
5	NTT	1 February 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Desa Hundihuk, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao	Rehabilitasi	Peneggelaman Rumah Ikan	0.25
6	NTB	2 February 2024	Persekutuan dan Perkumpulan Cahaya Buin Baru	Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Besar	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.26
7	NTB	2 February 2024	Persekutuan dan Perkumpulan Vannami Sukses Lestari	Desa Labuhan, Jambu Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.42
8	NTB	2 February 2024	Koperasi Nelayan Banjar Sejahtera	Kabupaten Sumbawa Barat	Perikanan Tangkap	Rumpon	0.02
9	NTB	2 February 2024	CV Budidaya Jaya Lestari	Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.36
10	NTB	2 February 2024	CV Tambak Sinar Berlian	Desa Boro, Kecamatan Sanggar,	Pipa Bawah	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.4

No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kategori	Kegiatan	Panjang/Luasan (Hektar)
				Kabupaten Bima	Laut Selain Energi		
11	NTT	27 February 2024	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP	Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	-
12	NTT	27 February 2024	PT Plataran Indonesia	Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Wisata Bahari	Dermaga Marina dan Aktivitas Olahraga Air	9
13	Jawa Timur	27 February 2024	PT Andalasia Adi Pratama	Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.45
14	Jawa Timur	27 February 2024	PT Aman Damai Abadi	Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi	Mitigasi Bencana	Gardu Pandang dan Penahan Abrasi	1

c. Maret

No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kegiatan	Kategori	Panjang/Luasan (Hektar)
1	Bali	18 March 2024	PT Dinar Darum Lestari	Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	1.01
2	Bali	18 March 2024	PT Dinar Darum Lestari	Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	1.42
3	Bali	18 March 2024	PT Dinar Darum Lestari	Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.89
4	Bali	18 March 2024	CV Gloria International	Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.87
5	Bali	18 March 2024	Yayasan Pelestarian Laut Nusantara	Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung	Rehabilitasi	Rehabilitasi Terumbu Karang	0.9

No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kegiatan	Kategori	Panjang/Luasan (Hektar)
6	Jawa Timur	19 March 2024	CV Anugerah	Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.12
7	Jawa Timur	19 March 2024	PT Bumiasri Lestari	Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.6
8	Jawa Timur	19 March 2024	CV Gosyen Aquaculture Bertu Perkasa	Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.45
9	Jawa Timur	19 March 2024	PT Banyu Biru Kahurangi	Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.3
10	NTT	20 March 2024	PT Salam Bajo Indonesia	Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Wisata Bahari	Dermaga Wisata dan Restoran	2.84
11	NTT	20 March 2024	PT Buki Savanna Raya	Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Wisata Bahari	Dermaga Wisata	2.26
12	Jawa Timur	20 March 2024	PT CJ Feed and Care Indonesia	Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.5
13	Jawa Timur	20 March 2024	CV Sabar Rejeki Abadi	Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.39
14	Jawa Timur	21 March 2024	Hadi Swiyanto	Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.08
15	Jawa Timur	21 March 2024	CV Anugerah Lautan Pertiwi	Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.81

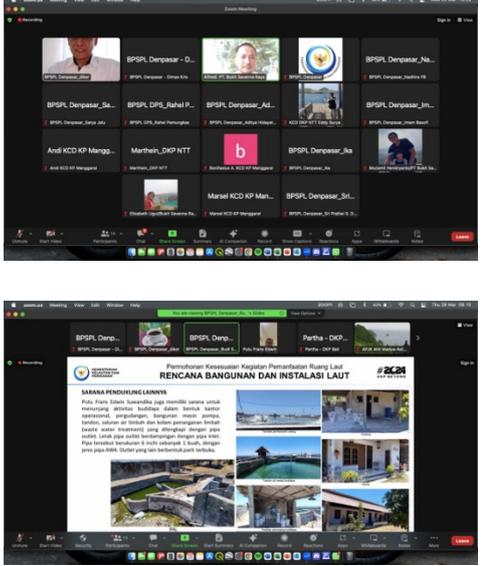
No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kegiatan	Kategori	Panjang/Luasan (Hektar)
16	Jawa Timur	21 March 2024	CV Sukses Indah Prima	Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.24
17	Jawa Timur	21 March 2024	CV Berkat Marine Indonesia	Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.27
18	NTB	22 March 2024	UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau	Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	1.39
19	NTB	22 March 2024	PT Royal Abadi Pacific	Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.06
20	NTB	22 March 2024	PT Mitra Anugerah Berkah Alam	Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.27
21	NTB	25 March 2024	CV Sarana Bahari Sejahtera	Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.6
22	NTB	25 March 2024	CV Jingga Marine Makmur	Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.13
23	NTB	25 March 2024	CV Sinta King Victory	Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.41
24	NTB	25 March 2024	PT Solusi Masyarakat Mandiri	Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.2
25	Bali	28 March 2024	Putu Frans Edwin Suwandika	Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Pipa Bawah Laut Selain Energi	Pemasangan Instalasi Perikanan	0.75
26	Jawa Timur	28 March 2024	CV Euro Makmur Sejahtera	Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo,	Budidaya Perikanan	Keramba Jaring Apung	1

No.	Provinsi	Tanggal Verifikasi	Pemohon	Lokasi	Kegiatan	Kategori	Panjang/Luasan (Hektar)
				Kabupaten Tulungagung			
27	Jawa Timur	28 March 2024	PT Aristocratama Binausaha	Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.3
28	Jawa Timur	28 March 2024	PT Aksara Bahana Abadi	Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi	Budidaya Perikanan	Budidaya Karang Hias	0.3

3. Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada Tiwulan I Tahun 2024 telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan pontoon wisata Bahari oleh 3 pelaku usaha di wilayah Bali. Kemudian dilakukan pendampingan identifikasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan rumpon menetap di Kabupaten Situbondo. Rencana lokasi rumpon menetap diajukan oleh 25 pemohon pada wilayah tersebut.

Tabel 14. Kegiatan Pendukung IKU 3

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut	

2.	Verifikasi pemanfaatan ruang laut	
3.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 3 di tahun 2024 adalah :

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut
- Koordinasi dengan Direktorat PRL terkait perkembangan dan penggunaan aplikasi e-sea

H. Realisasi Anggaran

Tabel 15. Realisasi Anggaran IKU 3

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1.100.000.000	169.133.751	15,38

IKU 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah provinsi yang didampingi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain yang sesuai dengan kondisi kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi-nya.

SK 4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar							
IKU 4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	2	-	-	-	2	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapat karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Tidak terdapat target IKU 4 pada triwulan I 2023 maupun Triwulan I 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Pada Renstra BPSPL Denpasar target tertuang dalam satuan luasan (20.767,11 Ha) sedangkan pada IKU 4 target tertuang dalam satuan jumlah daerah (2 daerah) sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu dilakukan identifikasi awal dan koordinasi di wilayah KKD Bali Selatan dan KKD Maubesi.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam pelaksanaan penetapan KKP3K antara lain:

- Adanya dugaan pihak yang memiliki kepentingan di lokasi atau wilayah tersebut.
- Tidak ditemukan ekosistem pesisir terumbu karang dan lamun di KKD Maubesi melalui identifikasi citra dan studi literatur jurnal. Ditemukan ekosistem mangrove di KKD Maubesi namun banyak yang masuk pada area darat

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- Diperlukan adanya FGD dengan pihak terlibat
- Melakukan koordinasi dan diskusi dengan pihak terkait tentang informasi awal dan langkah-langkah penetapan KKD

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

G. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Identifikasi awal dan koordinasi penetapan kawasan konservasi di wilayah KKD Bali Selatan
2. Identifikasi awal dan koordinasi usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah KKD Maubesi

Tabel 16. Kegiatan Pendukung IKU 2

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Identifikasi awal dan koordinasi penetapan Kawasan Konservasi di wilayah KKD Bali Selatan	 
2	Identifikasi awal dan koordinasi usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah KKD Maubesi	

I. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 4 adalah melanjutkan kegiatan pendampingan proses penetapan Kawasan Konservasi Daerah yang diamanatkan oleh pusat.

J. Realisasi Anggaran

Tabel 17. Realisasi Anggaran IKU 2

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	180.000.000	14.427.314	8,02

IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)

Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki maksud tujuan terwujudnya kesepakatan atau komitmen bersama antar stekholder untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, menyusun, menyepakati, dan mengevaluasi perjanjian kerja sama yang dilakukan.

SK 5	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar							
IKU 5	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	1	-	-	-	1	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapat karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan II. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Tidak terdapat target IKU 5 pada triwulan I 2023 maupun Triwulan I 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Pada Renstra 2020-2024 BPSPL Denpasar tidak terdapat target IKU 5 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu dilakukan identifikasi mitra dan pembahasan rencana kerja penyusunan perjanjian kerja sama.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu masih ada rencana kerja implementasi PKS yang belum dilaksanakan.

d. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melakukan evaluasi kegiatan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan dinas terkait, dan masyarakat untuk mendukung dan menyepakati bersama.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah Identifikasi mitra kerja sama, Pembahasan rencana kerja penyusunan perjanjian kerja sama BPSPL Denpasar

Tabel 18. Kegiatan Pendukung IKU 5

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Pembahasan rencana kerja penyusunan perjanjian kerja sama BPSPL Denpasar	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 5 adalah mengadakan pertemuan evaluasi antar pihak untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Denpasar dan Mitra Yayasan Penyuluhan Banyuwangi yang telah dilakukan pembahasan draft PKS sebelumnya.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 19. Realisasi Anggaran IKU 5

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	70.000.000	4.572.617	6,53

IKU 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)

Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan pada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Tata cara pemberian bantuan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan.

Tabel 20. Capaian IKU 6 BPSPL Denpasar TW I

SK 6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	2	-	-	-	3	-	4	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena direncanakan akan tercapai pada triwulan II dan triwulan III.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Tidak terdapat Target IKU 3 pada Triwulan I 2023 maupun Triwulan I 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target kelompok yang diberikan bantuan tahun 2024 pada renstra 2020-2024 adalah 4 kelompok, namun pada tahun 2024 target penyerahan bantuan hanya pada 3 kelompok sehingga pencapaian terhadap renstra akan kurang dari 100%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah dilakukan inventarisir usulan kelompok di wilayah kerja BPSPL Denpasar, mengidentifikasi atas usulan (proposal) kelompok, verifikasi kelompok masyarakat.

d. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

d. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait dan masyarakat untuk menjalin kerjasama, jejaring, dan kemitraan di lokasi yang telah ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan pengusulan 3 kelompok calon penerima bantuan KOMPAK yang dipilih dari 29 kelompok ke Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Mutiara Laut Sumbreng dan Kejung Samudra, Jawa Timur
2. Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Bua Lawah dan Sumbawa Grow Up, NTB
3. Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Desa Lewutobi, NTT

Tabel 21. Kegiatan Pendukung IKU 6

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Mutiara Laut Sumbreng dan Kejung Samudra, Jawa Timur	
2	Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Bua Lawah dan Sumbawa Grow Up, NTB	
3	Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Desa Lewutobi, NTT	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 6 adalah melanjutkan rangkaian kegiatan serah terima bantuan KOMPAK yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 22. Realisasi Anggaran IKU 6

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
6	Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	385.000.000	20.637.069	5,36

IKU 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 23. Capaian IKU 7 BPSPL Denpasar TW I

SK 6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian baru (Kelompok)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	1	-	-	-	1	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Pada Triwulan I tahun 2023 dan Triwulan I tahun 2024 tidak terdapat target IKU Kelompok Masyarakat yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Pada Renstra tidak terdapat IKU Kelompok Masyarakat yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, karena kegiatan pendukung belum dilaksanakan karena anggaran pelaksanaan diblokir.

b. Analisis Kegagalan

Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, karena kegiatan pendukung belum dilaksanakan karena anggaran pelaksanaan diblokir.

c. Solusi

Melaksanakan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ketika tagging blokir dihapus (anggaran dapat ditarik).

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Belum dapat dilakukan analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja ini, karena kegiatan pendukung belum dilaksanakan karena anggaran pelaksanaan diblokir.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung belum dilaksanakan karena anggaran pelaksanaan diblokir.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Belum disusun Rencana Aksi Tindak Lanjut karena kegiatan belum bisa

dilaksanakan sebab anggaran pelaksanaan diblokir.

H. Realisasi Anggaran

Terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU 7 Kelompok masyarakat di Kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) sebesar Rp200.000.000,00 namun keseluruhan anggaran tersebut diblokir sehingga saat ini tidak dapat digunakan

Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU 7

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian baru (Kelompok)	200.000.000	-	-

IKU 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota laut dilindungi adalah jenis ikan ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan atau pemulihan dilindungi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan serta respon cepat penanganan bioa laut dilindungi. Jumlah target jenis tersebut adalah hiu Apendiks CITES, pari Apendiks CITES, penyu, hiu paus, dan karang. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

- a. Monitoring hiu dan pari Apendiks CITES, penyu, hiu paus
- b. Rehabilitasi karang.
- c. Respon cepat penanganan biota laut dilindungi/terancam punah
- d. Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan perbaikan habitat/ pemulihan populasi atau penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 25. Capaian IKU 8 BPSPL Denpasar TW I

SK 7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	6	-	-	-	6	-	5	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan..

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Pada triwulan I tahun 2023 maupun triwulan I tahun 2024 tidak terdapat target sehingga belum bisa dibandingkan. Perbandingan

C. Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target jenis merupakan target tahunan sehingga belum bisa dibandingkan dengan renstra.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

- Enumerasi pendaratan hiu dan pari di lima lokasi antara lain Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Pelabuhan Perikanan Muncar, Pelabuhan Perikanan Benoa, PPI Tanjung Luar, dan Namosain-Kupang oleh enumerator bulan Februari-Maret 2024
- Persiapan dan koordinasi awal pendataan sebaran penyu
- Monitoring populasi hiu paus oleh enumerator yang telah berjalan selama 2 bulan
- Penyusunan rencana pelaksanaan, koordinasi, dan survei awal kegiatan rehabilitasi karang

- Piket rutin bulanan Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi / terancam punah di wilayah kerja BPSPL Denpasar
- Rapat kerja dan pembuatan bahan sosialisasi biota dilindungi/terancam punah

a. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu:

- pada pendataan penyu, belum memasuki musim peneluran
- pada rehabilitasi karang, jumlah personal berkemampuan selama SCUBA professional terbatas
- pada respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah yaitu lokasi yang jauh dari kedudukan serta belum semua memahami tentang penanganan biota laut dilindungi/terancam punah.

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah berjejaring dengan mitra, koordinasi dengan stekholder terkait, dan melakukan sosialisasi.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, enumerator, NGO, nelayan dan masyarakat untuk mendukung kegiatan di lokasi yang telah ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Monitoring pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES yaitu Enumerasi pendaratan hiu dan pari (Brondong, Muncar, Bena, Tanjung Luar, dan Kupang) oleh enumerator selama triwulan I tahun 2024 dengan sebagian data hasil enumerasi sebagai berikut:

Tabel . Jumlah Hiu dan Pari Apendiks Februari – Maret 2024

Jenis	Jumlah (Individu)				
	BRD	MCR	BEN	TJL	KPG
Apendiks II CITES	5.259	357	5.950	1.125	106
Hiu	3.461	298	5.936	1.088	99

Pari	1.798	59	14	37	7
Non Apendiks CITES	701	482	53	1.455	3
Hiu	443	28	0	737	3
Pari	258	454	53	718	0
TOTAL	5.960	839	6.003	2.580	109

2. Pendataan Sebaran Penyu; Kegiatan Pendataan Sebaran Penyu akan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar. Adapun daftar Kelompok Masyarakat yang dijadikan mitra dalam kegiatan pendataan ini, masih sama dengan mitra pendataan sebelumnya pada tahun 2024 yaitu:

- a. KUB Pantai Rejo – Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
- b. Pokmaswas Mutiara Laut Sumbreng– Kab. Trenggalek, Jatim
- c. Kelompok Benteng Samudra – Kota Surabaya, Jawa Timur
- d. Turtle Conservation Education Center – Kota Denpasar, Bali
- e. Kelompok Yowana Bhakti Segara – Kab. Karangasem, Bali
- f. KUB Sari Segara – Kota Denpasar, Bali
- g. Pokmaswas Penimbang Lestari – Kab. Buleleng, Bali
- h. Saba Asri Turtle Conservation – Kab. Gianyar, Bali
- i. Kelompok Shindu Dwarawati – Kota Denpasar, Bali
- j. Kelompok Watu Klotok – Kab. Karangasem, Bali
- k. Kurma Asih – Kabupaten. Jembrana, Bali
- l. Pokmaswas Pandanan – Kab. Lombok Utara, NTB
- m. Pokmaswas Pencinta Penyu Mapak – Kota Mataram, NTB
- n. Kelompok BBC Senggigi – Kab. Lombok Barat, NTB
- o. Kelompok Sekongkang – Kab. Sumbawa, NTB
- p. Pokmaswas Jalur Gaza – Kab. Flores Timur, NTT
- q. Kelompok Sahabat Penyu Loang – Kab. Lembata, NTT

Mitra-mitra tersebut dapat berkurang maupun bertambah seiring dengan kondisi dan keaktifan kelompok masyarakat dalam pengumpulan data

3. Monitoring Hiu Paus : monitoring populasi hiu paus selama triwulan I tahun 2024 di perairan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dengan rekapitulasi data hasil monitoring

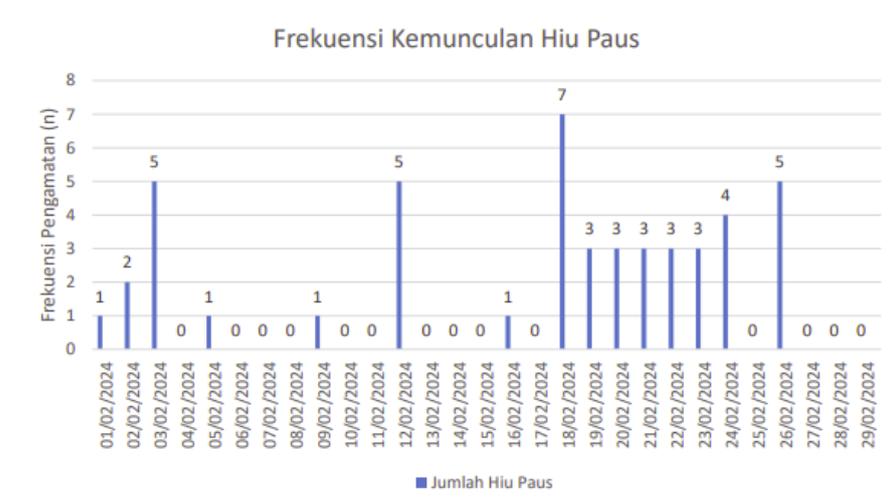
hiu paus sebagai berikut.

1. Lokasi monitoring di sepanjang Pantai perairan Probolinggo yang diduga menjadi tempat hiu paus bermunculan adalah sebagai berikut

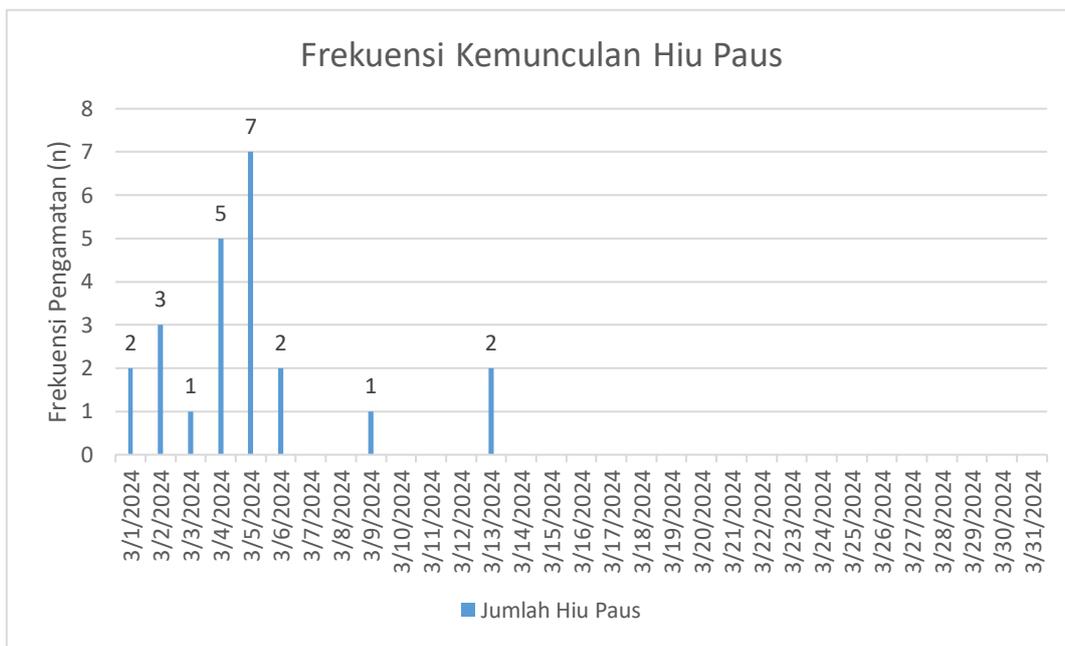


Gambar 3. Peta lokasi monitoring hiu paus tahun 2024

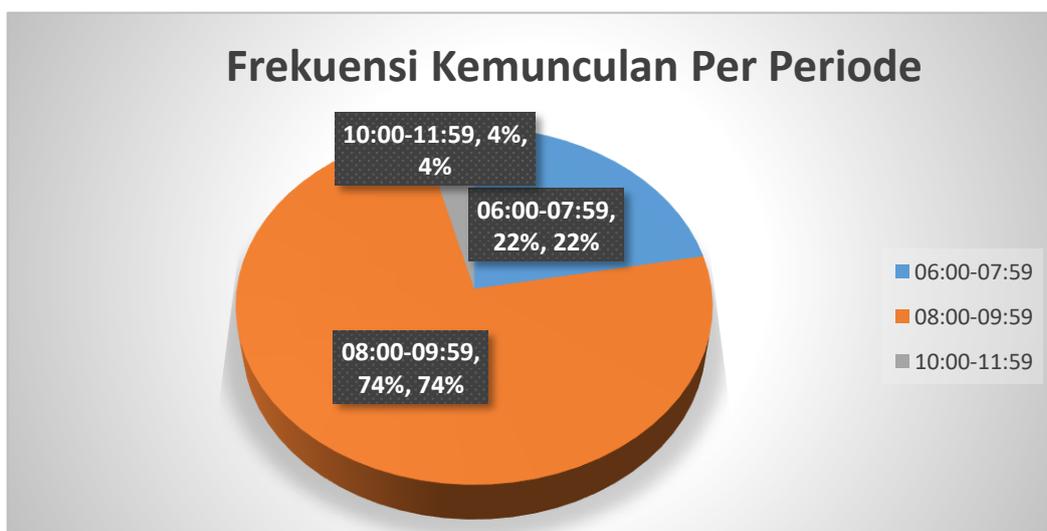
Monitoring sebaran hiu paus terjadi dari perairan Kecamatan Dringu hingga Perairan Kecamatan Gending. Individu yang muncul cenderung berada didaerah pesisir berenang ke arah timur. Hiu paus memakan zooplankton atau ikan teri. Kemunculan hiu paus pada bulan Februari sejalan dengan keberadaan makanan berupa ikan teri. Cuaca wilayah Probolinggo masuk musim penghujan yang dimana intensitas curah hujan tinggi, ini menyebabkan aliran sungai menjadi banjir tercampur dengan sendimen yang menyebabkan hiu paus tidak muncul ke permukaan.



Grafik 6. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Februari Tahun 2024 di Probolinggo



Grafik 7. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Maret Tahun 2024 di Probolinggo



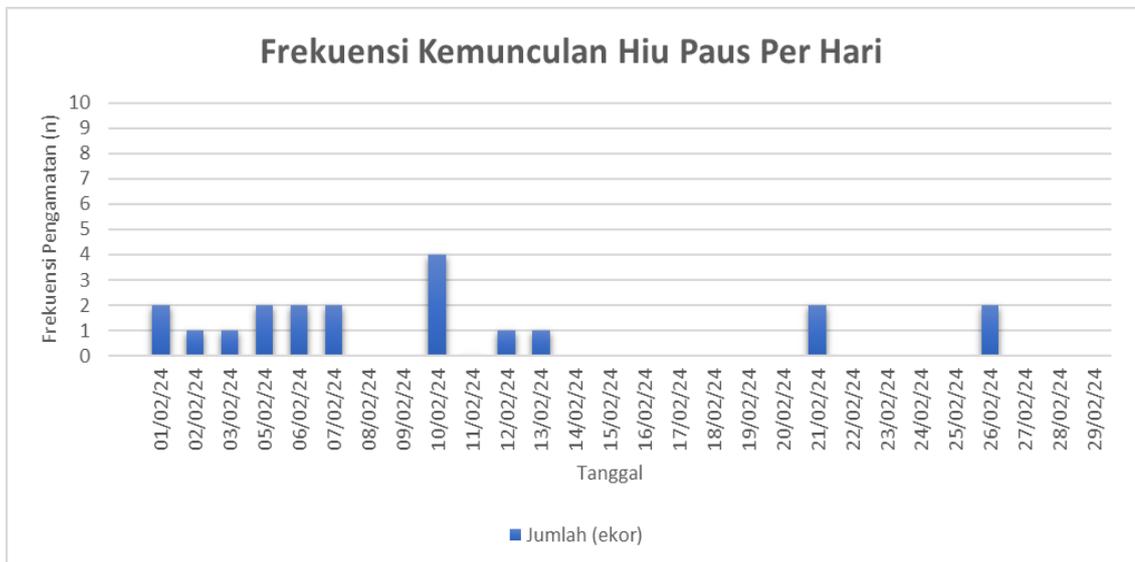
Grafik 8. Diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus per periode waktu di Probolinggo

2. Peta prediksi sebaran, grafik frekuensi, dan diagram frekuensi kemunculan kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Situbondo

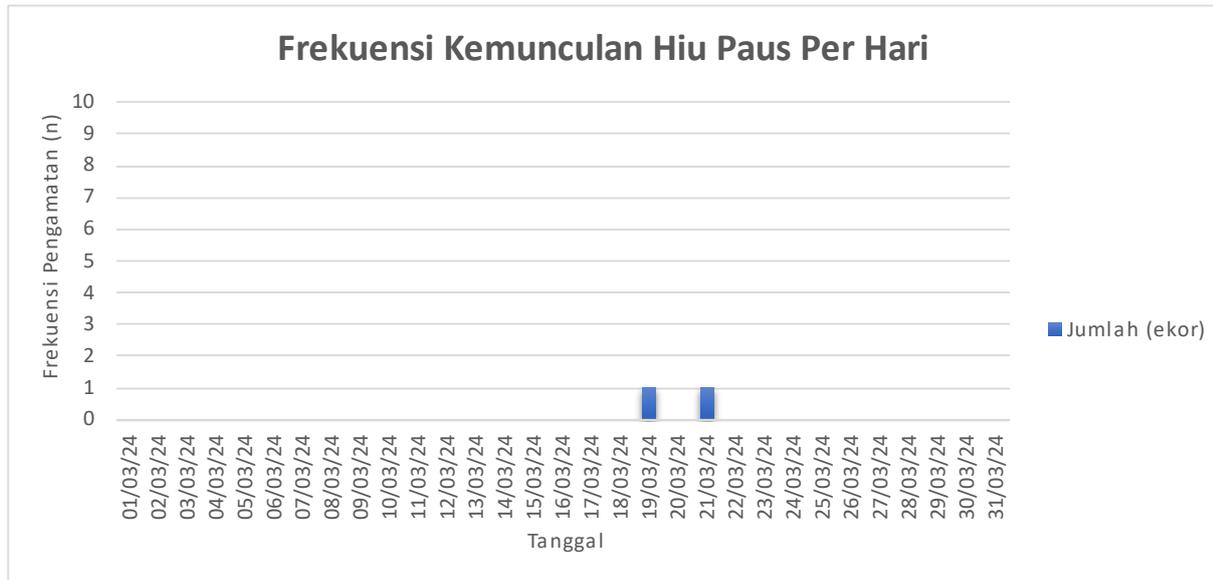
Gambar 4. Peta prediksi sebaran kemunculan Hiu Paus Tahun 2024 di Situbondo



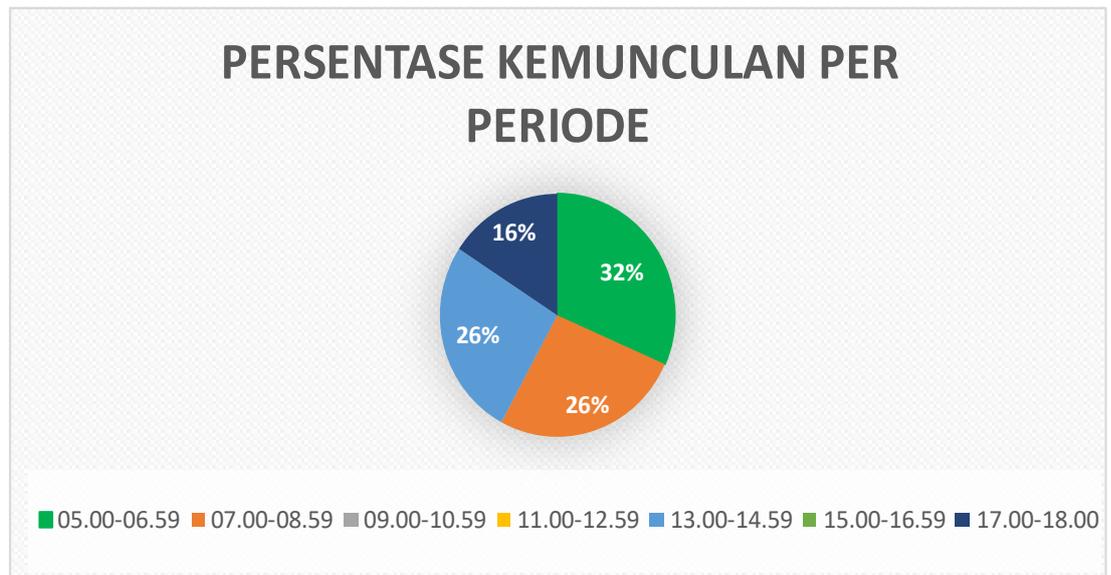
Grafik 9. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Februari Tahun 2024 di Situbondo



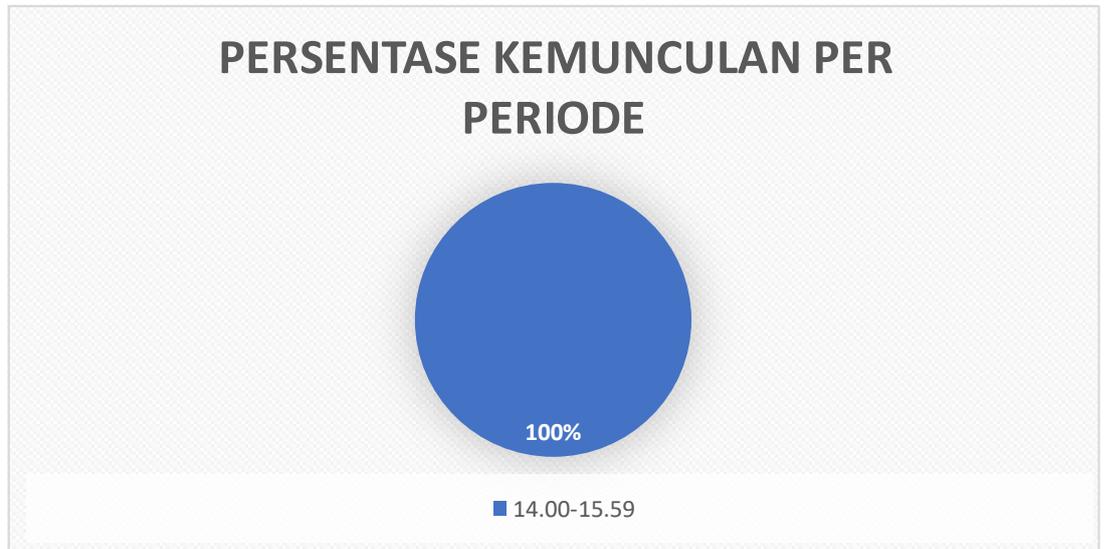
Grafik 11. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Bulan Maret Tahun 2024 di Situbondo



Gambar 5 . Diagram Presentase Kemunculan Per Periode Februari 2024



Gambar 6. Diagram Presentase Kemunculan Per Periode Maret 2024



4. Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah pada triwulan I terdapat perkembangan kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
 - Koordinasi dengan para pihak terkait
 - Survei awal di Sekotong, TWP Gita Nada, Kabupaten Lombok Barat
5. Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah
Kejadian respon cepat penanganan biota laut dilindungi yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar di masing-masing wilayah kerja hingga Triwulan I tahun 2024 yaitu:

Tabel 26. Rekap kejadian respon cepat BPSPL Denpasar hingga Triwulan I

Bulan	Wilayah Kerja	Jumlah Kejadian
Januari	Jawa Timur	-
	Bali	1
	Nusa Tenggara Barat	-
	Nusa Tenggara Timur	-
Februari	Jawa Timur	1
	Bali	2
	Nusa Tenggara Barat	1
	Nusa Tenggara Timur	-

Bulan	Wilayah Kerja	Jumlah Kejadian
Maret	Jawa Timur	1
	Bali	1
	Nusa Tenggara Barat	1
	Nusa Tenggara Timur	-

Tabel 27. Kegiatan Pendukung IKU 8

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Monitoring pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES	
2.	Pendataan sebaran penyu	

		 <p>15 Mar 2024 09:39:49 8.63375671S 116.07352696E 262' W Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Altitude: 26.0m Speed: 1.2km/h</p>  <p>©2024</p>
3.	Monitoring populasi hiu paus di perairan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur	 <p>15 Feb 2024 11:14:52 7.7092317S 113.9858927E 55' NE No. 2 F Jalan Pb. Sudirman Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Jawa Timur Altitude: 56.5m</p>  <p>17 Feb 2024 08:19:50 -7°43'24.65426"S 113°40'59.17454"E 139' SE Indonesia Altitude: 24.0m Speed: 7.2km/h Index number: 1360</p>

4.	Rehabilitasi karaang	 <p>2024/03/07 15:38</p>  <p>19 Feb 2024 14.15.40 Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat</p>
5.	Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	
6.	Sosialisasi Biota Dilindungi/ Terancam Punah	 <p>Karangasem, Bali, Indonesia Kubu, Karangasem, Bali, Indonesia Lat: -8.252976, Long: 115.567043 03/19/2024 11:42 AM GMT+08:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>



G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 8 adalah :

- Pendataan hiu-pari oleh enumerator : Melanjutkan kegiatan monitoring pendaratan hiu-pari pada triwulan II tahun 2024.
- Pendataan sebaran penyu : Melanjutkan kegiatan pendataan sebaran penyu dengan membimbing kelompok masyarakat dalam pengumpulan data secara aktif agar tercapai kebutuhan data secara ideal.
- Monitoring populasi hiu paus : melanjutkan kegiatan monitoring Hiu-Paus pada triwulan II tahun 2024.
- Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah : pembuatan media transplantasi tambahan, penanaman karang, serta penguatan kapasitas dan kompetensi kelompok Masyarakat pengawas Elak-Elak dan sekitarnya.
- Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi / terancam punah : Penugasan personil secara konsisten sesuai jadwal piket respon cepat yang sudah dibuat bila ada kejadian yang memerlukan penanganan/respon cepat dan jika anggaran memungkinkan diadakan bimtek/pelatihan penanganan biota terdampak bagi para pegawai yang belum mendapatkan bimtek/pelatihan supaya mengetahui dasar-dasar penanganannya.

- Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah: koordinasi dan sinkronisasi bahan sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada triwulan berikutnya.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 28. Realisasi Anggaran IKU 8

No.	IKU	Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan	Monitoring Pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES	350.000.000	37.159.896	10,62
		Pendataan Sebaran Penyu	52,950.000	4.401.500	8,31
		Monitoring Populasi Hiu Paus	66.550.000	11.764.360	17,68
	Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Rehabilitasi Populasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	100.000.000	9.815.476	9,82
		Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah	150.000.000	10.407.915	6,94
		Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	100.000.000	1.920.000	1,92

IKU 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutak di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Upaya pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan atau jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

- a. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan yaitu hiu, pari, arwana, dan teripang
- b. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan atau look alike species seperti hiu, pari, softcoral, arwana, dan teripang,

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix cites, dan/atau look alike spesies dan pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 29. Capaian IKU 9 BPSPL Denpasar TW I

SK 8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	6	-	-	-	6	-	6	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

C. Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu untuk kegiatan Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan/atau Look Alike Species telah dilakukan koordinasi dan survei pengumpulan data di Jawa Timur. Untuk kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES telah dilakukan verifikasi Jenis Ikan Dilindungi/

tidak Dilindungi dan Appendiks CITES yang Diatur Peredarannya, Penerbitan Dokumen SAJI dan Rekomendasi, Verifikasi Lapangan SIPJI, dan pemeriksaan stok bulanan.

b. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini baik pendataan potensi dan pelayanan pemanfaatan jenis ikan.

c. Solusi

Solusi yang tidak dapat diberikan karena tidak terdapat permasalahan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

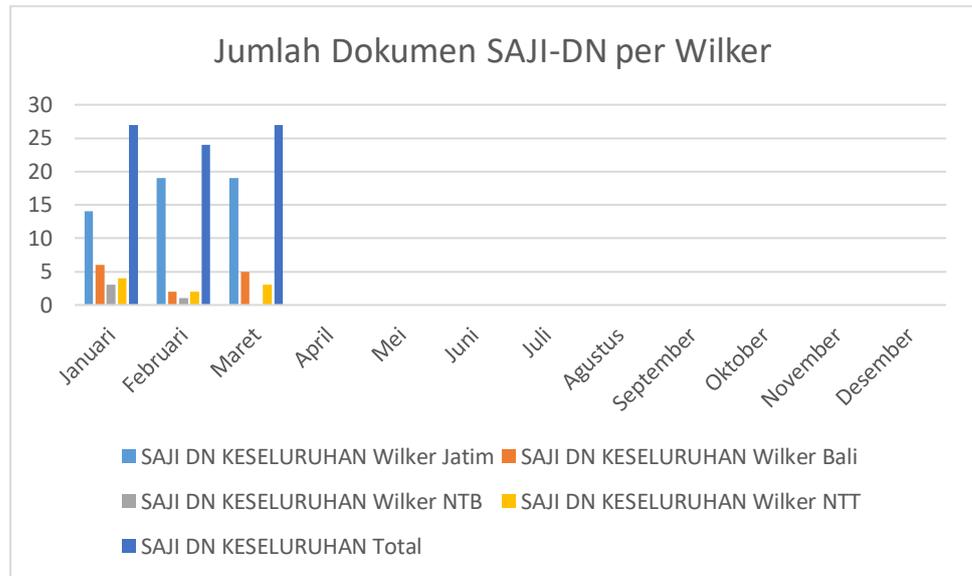
Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, Enumerator, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

G. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

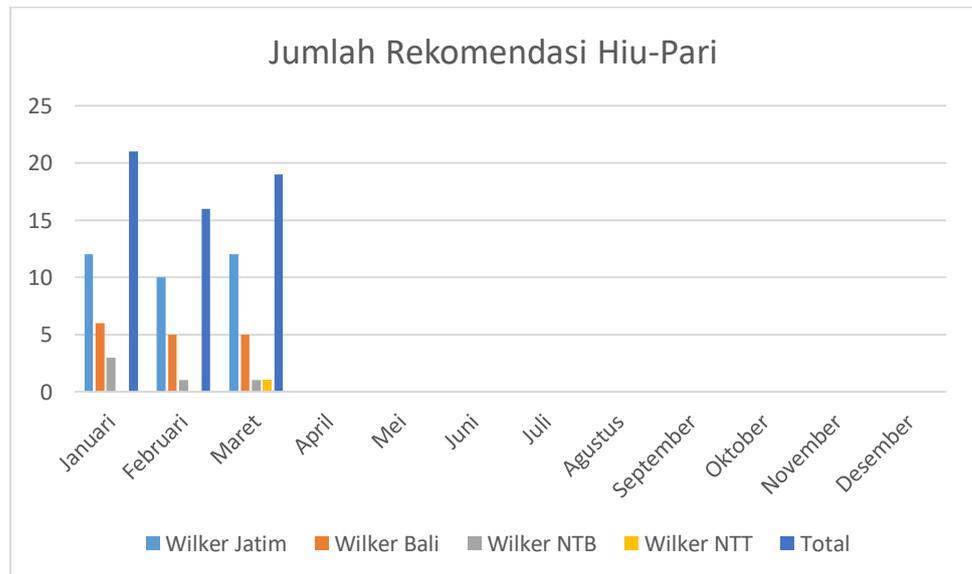
1. Pengumpulan data potensi antara lain: persiapan dan koordinas, survei lapangan di Jawa Timur yaitu di Kota Batu dan Kab. Lamongan.
2. Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES:
 - Penerbitan SAJI DN
BPSPL Denpasar melakukan penerbitan SAJI DN untuk jenis-jenis ikan yang masuk kedalam Apendiks CITES seperti Hiu, Pari, dan Arwana. Selama Triwulan II total terdapat 36 Dokumen SAJI DN yang telah diterbitkan dengan rincian sebagai berikut

Grafik . Jumlah Dokumen SAJI DN Per Wilker Triwulan I



- Penerbitan Rekomendasi *Look Alike* (Jenis Hiu dan Pari)
Kegiatan pelayanan penerbitan surat rekomendasi jenis ikan Hiu dan Pari look alike species triwulan I yang dihitung sejak bulan Januari – Maret 2024, total terdapat 56 Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan dengan rincian setiap bulan sebagai berikut.

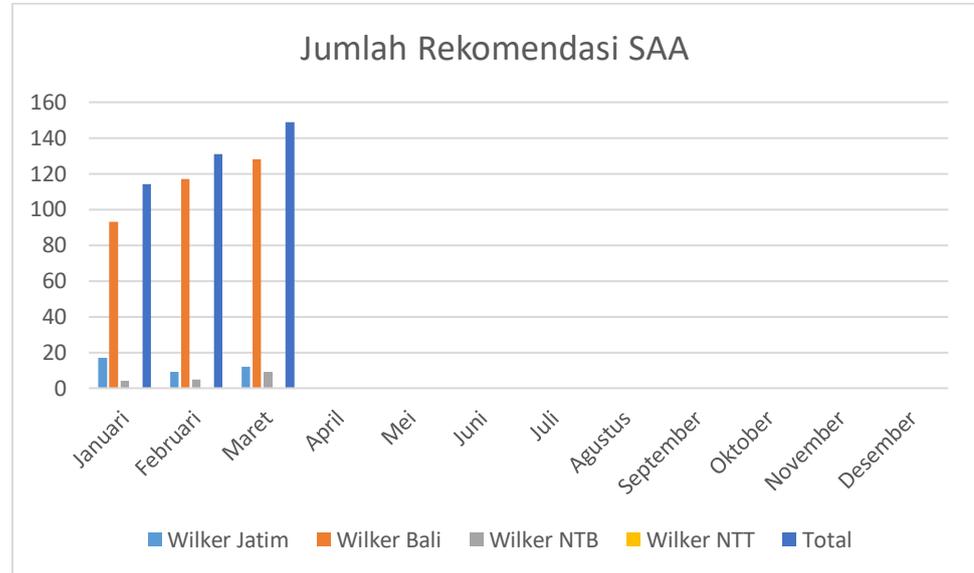
Grafik 12. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari Triwulan I



- Penerbitan Rekomendasi *Look Alike* (Jenis Karang Hias)
Selain Hiu dan Pari BPSPL Denpasar juga mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Karang Hias terutama jenis-jenis Soft Coral,

Anemone, dan Artificial Live Rock (SAA) Selama Triwulan I total dokumen Rekomendasi Karang Hias yang telah terbit sebanyak 394 dokumen dengan rincian masing-masing per bulan adalah sebagai berikut.

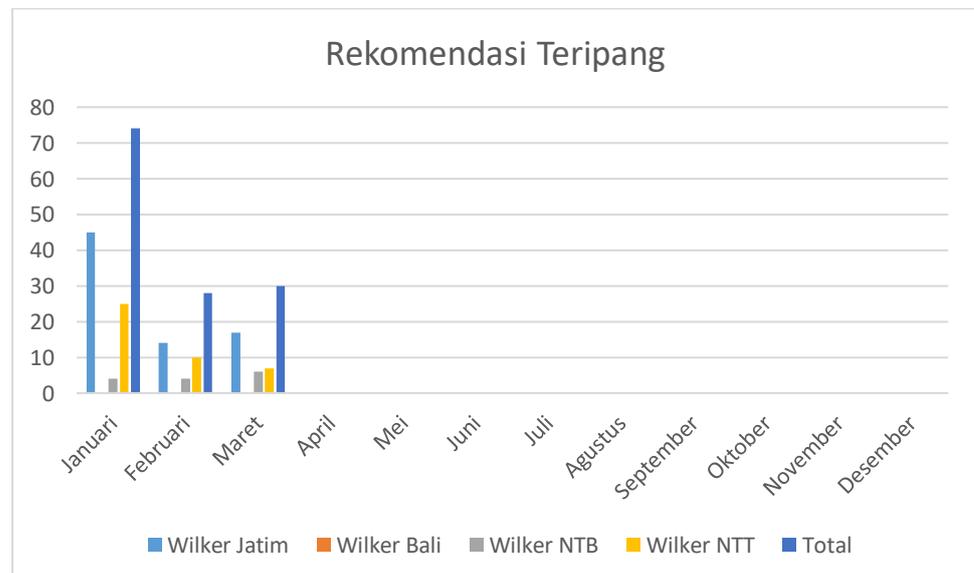
Grafik 13. Jumlah Rekomendasi SAA Triwulan I



- Penerbitan Rekomendasi Jenis Ikan (Teripang)

Kegiatan terakhir dalam penerbitan dokumen Rekomendasi untuk jenis teripang look alike species yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar bagian dari Pelayanan Publik adalah untuk Pemanfaatan Teripang. Adapun rincian total rekomendasi adalah sebagai berikut.

Grafik 14. Jumlah Rekomendasi Teripang Triwulan I



- Penerbitan SAJI DN Selain Arwana
Selain SAJI DN untuk Arwana dan Hiu dan Pari Appendiks CITES, BPSPL Denpasar menerbitkan SAJI DN untuk jenis lain yaitu jenis BCF dan Sidat dengan total 161 SAJI DN.
- Verifikasi Lapang SIPJI
Kegiatan Verifikasi Lapang SIPJI dilakukan untuk menerbitkan Berita Acara sebagai dokumen syarat pengajuan SIPJI. Pada Triwulan I telah dilakukan verifikasi antara lain sebagai berikut

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Bulan Verifikasi Lapang
1	PT Sentral Benoa Utama	Bali	Januari
2	PT Taman Safari Indonesia	Bali	Februari
3	PT Bali Double C	Bali	Februari
4	PT Bali Double C	Bali	Februari
5	PT Bali Mina Segara	Bali	Februari
6	PT Dinar Darum Lestari	Bali	
7	Arif Pitoyo	Jawa Timur	Januari
8	Iwan	Jawa Timur	Februari
9	CV Affandi Jaya	Jawa Timur	Februari
10	PT Akuarium Laut Bali	Bali	Februari
11	PT Akuarium Laut Bali	Bali	Februari
12	PT Sari Laut	Jawa Timur	Februari
13	UD Bali Mina Segara	Bali	Maret

Tabel 30. Kegiatan Pendukung IKU 9

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Penyediaan Data Potensi	

		 <p>15 Feb 2024 11.16.53 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur</p>
2.	<p>Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES</p>	 <p>22 Apr 2024 13:05:26 8.697251915 -115.237698115 21° 0' 0" S W Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali</p>  <p>22 Feb 2024 14:15:53 8.73947835 -115.2084423E 21° 0' 0" S W 17 Jalan Ikan Tuna IV Kota Denpasar Bali</p>

H. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 9 adalah :

- Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan/atau Look Alike Species: Tabulasi hasil pengumpulan data tahun 2024 dan Input data ke spreadsheet data base.
- Melanjutkan kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES

I. Realisasi Anggaran

Tabel 31. Realisasi Anggaran IKU 9

No.	IKU	Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	140.000.000	4.863.277	3,47
		Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	1.200.000.000	116.187.812	9,68

IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Sosialisasi dan Survei Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan pemanfaatan ALSE. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan verifikasi ini pelaku usaha/masyarakat dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemanfaatan ALSE dapat tertib administrasi perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan pemanfaatan air laut selain energi yang identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 32. Capaian IKU 10 BPSPL Denpasar TW I

SK 8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	1	-	-	-	1	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa

dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu pembagian tim kerja, pendampingan kunjungan kerja, dan mengikuti sosialisasi dari Direktorat Jasa Kelautan.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu belum ada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jasa Kelautan terkait petunjuk teknis pemanfaatan air laut selain energi.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

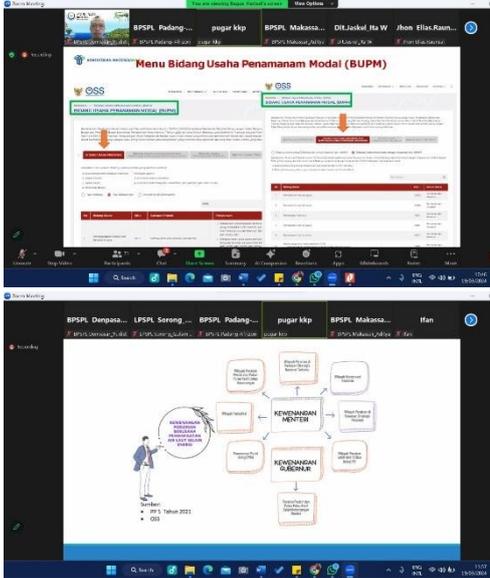
Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, Enumerator, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Mengikuti sosialisasi izin pemanfaatan air laut selain energi

Tabel 33. Kegiatan Pendukung IKU 10

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Mengikuti sosialisasi izin pemanfaatan air laut selain energi	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 10 adalah melakukan koordinasi kepada Direktorat Jasa Kelautan terkait petunjuk teknis untuk melanjutkan kegiatan.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 34. Realisasi Anggaran IKU 10

No.	IKU	Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Sosialisasi dan Survei Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	225.000.000	1.196.000	0,53

IKU 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (kawasan)

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar diharapkan dapat memberikan informasi jenis pencemaran, Upaya pencegahan terjadinya kerusakan yang masig, uupaya penanggulangan pencemaran dan kegiatan bersih Pantai dan laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kejadian kegiatan bulan cinta laut dan aksi penanggulangan dampak pencemaran di WP3K wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 35. Capaian IKU 11 BPSPL Denpasar TW I

SK 10	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran							
IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	2	-	-	-	2	-	-	-

A. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu survei dan identifikasi awal pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan melakukan

respon cepat penanggulangan bencana pencemaran pesisir.

e. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini baik pada Gerakan nasional bulan cinta laut atau respon cepat penanggulangan bencana.

f. Solusi

Solusi tidak dapat diberikan karena tidak ada permasalahan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, Enumerator, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan I tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Survei dan identifikasi awal Gerakan nasional Bulan Cinta Laut
2. Respon Cepat Penanggulangan Bencana di Lombok Barat berdasarkan surat dari Polairud Polda NTB Pos Pantai Damai Sejahtera (PDS), Sekotong, Lombok Barat pada 8 Maret 2024.

Tabel 36. Kegiatan Pendukung IKU 10

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Survei dan identifikasi awal Bulan Cinta Laut	

2	Respon Cepat Penanggulangan Bencana	
---	-------------------------------------	--

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 11 adalah:

1. Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut: melaksanakan rencana aksi dua kali sosialisasi dan tiga kali bimtek
2. Respon Cepat Penanggulangan Bencana: melaksanakan kegiatan rutin respon atas laporan pencemaran di WP3K wilayah kerja BPSPL Denpasar.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 37. Realisasi Anggaran IKU 10

No.	IKU	Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan	Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	400.000.000	17.651.165	4,41
	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	Respon Cepat Aksi Penanggulangan Bencana	100.000.000	0	0

IK 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah Nilai Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 38. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Devisiasi RPD (Halaman III DIPA)	10
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi Penyampaian SPM	5
8	Capaian Output	25

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Tabel 39. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	93,76	-	-	-	93,76	-	90	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU semester dan direncanakan akan tercapai pada semester I. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024
Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar
Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan
- Melaksanakan kriteria-kriteria yang menjadi penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan Rekonsiliasi serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Lain.
- b. Analisis Kegagalan
- Tidak terdapat permasalahan.
- c. Solusi
- Tidak diberikan Solusi karena tidak ada permasalahan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menunjuk penanggung jawab untuk penginputan sehingga dapat meminimalisir kesalahan.
- F. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan kriteria-kriteria penilaian IKPA sesuai dengan ketentuan, Monitoring terhadap capaian kinerja dapat dilakukan melalui aplikasi OM SPAN pada Modul PA, serta Rekonsiliasi serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Lain.
- G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya
Melakukan upaya monitoring secara rutin atas pencapaian indikator kinerja.
- H. Realisasi Anggaran
Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai).

IK 13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Tabel 40. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	86	-	-	-	86	-	89	-

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU semester dan direncanakan akan tercapai pada semester I. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan).

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024
Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar
Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan
Analisis keberhasilan disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala.
 - b. Analisis Kegagalan
Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.
 - c. Solusi
Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan koordinasi antar semua penanggungjawab kegiatan di semua seksi.
- F. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :
1. Kegiatan penyediaan perangkat pengolah data dan informasi
 2. Kegiatan layanan Barang Milik Negara
 3. Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan diantaranya berupa kegiatan pemenuhan sarana dan prasana rumah tangga untuk menunjang TUSI BPSPL Denpasar, kegiatan persiapan dan dekorasi menjelang Idul Fitri 1445H.
 4. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan
 5. Kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor berupa pembayaran kebutuhan sehari-hari perkantoran, jamuan tamu, honorarium petugas kebersihan, satpam/sopir, pramubakti, petugas outsourcing, pengiriman pos, honorarium pengelola keuangan, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan listrik, telepon dan PDAM.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan monitoring secara rutin terhadap pencapaian indikator kinerja.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU 13 Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar.

IK 14. Nilai Unit Kinerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Nilai kinerja RB DJPRL diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan: pola pikir dan budaya kerja aparatur, Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
2. peraturan perundang-undangan: regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
3. Organisasi: yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
4. Tata laksana: sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;
5. SDM Aparatur: yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
6. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn;
8. Pelayanan publik: pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 41. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar TW IV

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 14	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	75	-	-	-	75	-	78	-

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan I, target IK belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena kerja sama yang baik dari koordinator-koordinator kegiatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan WBK secara bertahap.

b. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan koordinasi antar semua penanggungjawab kegiatan di semua seksi

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan evaluasi WBK
2. Pembentukan Tim Kerja

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan pendokumentasian dokumen kelengkapan WBK dengan lebih baik.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 14 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Nilai).

IK 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai tersebut diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja.
- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 42. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	88	-	-	-	88	-	76	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IK semester dan direncanakan akan tercapai pada Semester I. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena pelaksanaan kegiatan manajemen SDM secara rutin yang baik oleh koordinator kegiatan dan kerjasama yang baik dari staf pelaksana kegiatan dalam penyusunan SKP.

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Penggunaan anggaran untuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, magang dan sebagainya, selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui daring agar para peserta yang tidak dapat hadir luring dapat melalui daring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Menyusun dokumen bazetting dan Peta jabatan
2. Melakukan Pembinaan SDM Aparatur dan layanan perkantoran
3. Melakukan koordinasi pengurusan taspen PNS Aktif pensiun karena meninggal dunia tanggal 24 Jan 2024
4. Melakukan Penilaian kinerja pegawai Triwulan IV dan Final 2023
5. Menyiapkan data proyeksi mutasi pegawai tahun 2024
6. Melakukan koordinasi pengadaan pakaian kerja pegawai di Denpasar
7. Melakukan senam pagi bersama tanggal 5 januari 2024, 2 Februari 2024 dan 23 Feb 2024
8. Mengusulkan pegawai yang akan mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 2024
9. Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2024
10. Menyiapkan dokumen dan kelengkapan dokumen untuk proses penerbitan SK Pensiun Pegawai BPSPL Denpasar
11. Menyiapkan proses pelaksanaan Dialog kinerja BPSPL Denpasar
12. Memproses Usulan Mengikuti Seleksi Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP dan APJK Melalui Mekanisme Perpindahan Jabatan Tahun 2024
13. Melakukan pembinaan SDM Aparatur untuk pegawai di kantor BPSPL DPS wilker NTT di Kupang
14. Melakukan rekonsiliasi data dan iuran peserta PPNPN pada satker dengan data pada master file BPJS Kesehatan di Gianyar tgl 13 Maret 2024
15. Melakukan senam pagi bersama tanggal 8 Maret 2024
16. Menyiapkan jadwal kerja bulan ramadhan tahun 2024
17. Mengusulkan calon peserta penilaian kompetensi untuk proses izin belajar tahun 2024 - 2025
18. Mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar tahun 2024 dan tahun 2025
19. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi (HCDP) tahun 2024 - 2027

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya adalah melanjutkan pengadministrasian kepegawaian dengan tertib dan mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan nilai IP ASN individu pada aspek kompetensi dengan mengikuti workshop, bimtek, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan segera mengupdate data peningkatan kompetensi yang telah diikuti pada aplikasi epegawai

H. Realisasi Anggaran

Tabel 43. Realisasi Anggaran IK 15

No.	IKU		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar	Layanan Manajemen SDM	220.000.000	38.682.298	17,58

IK 16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu :

Tabel 44. Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk

Predikat	Nilai	Interpretasi
		pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem

Predikat	Nilai	Interpretasi
		manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 45. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar TW I

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	81	-	-	-	81	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IK belum tercapai karena merupakan target IK tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Tidak terdapat Target IK 13 pada Triwulan I 2022 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Tidak terdapat target IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar berdasarkan Renstra 2020-2024, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

b. Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena dalam pelaksanaannya penyiapan dan penyampaian dokumen, pencapaian kinerja, dan pelaporan dilakukan dengan tepat waktu

c. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara membuat email khusus untuk pengumpulan dokumen dan laporan. Selain itu para pegawai diwajibkan untuk mengumpulkan triwulan dan laporan akhir kegiatan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
2. Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi triwulan berikutnya adalah

1. Melanjutkan kegiatan Penganggaran berupa Penyusunan Anggaran dan Revisi POK untuk untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan melanjutkan penyampaian pelaporan secara rutin.
2. Melanjutkan kegiatan penyiapan dan penyampaian dokumen pencapaian kinerja & pelaporan dilakukan dengan tepat waktu.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 16 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).

IK 17. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen pendukung laporan SPIP yang disiapkan oleh Direktorat adalah:

- a. pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. pengendalian penyusunan anggaran;
- c. pengendalian pengadaan barang/jasa;
- d. pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. pemantauan Manajemen Resiko; dan/atau
- f. pengendalian penyerapan anggaran.

Teknik Menghitung untuk Setdit dan UPT adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Sedangkan untuk Direktorat Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen

pendukung laporan SPIP yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat PRL.

Tabel 46. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	4	-	-	-	4	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IK tercapai 100% (1 dari 1 target telah tercapai).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan IV 2024

Pada triwulan I 2022 dan triwulan I 2023 target laporan SPIP sama-sama tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen laporan (tercapai 100%).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar karena tidak terdapat IK tersebut pada Renstra.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini berhasil melakukan persiapan penyusunan laporan SPIP dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan membuat draft laporan SPIP.

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menunjuk penanggung jawab pelaporan SPIP.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian indikator ini adalah membuat draf laporan pengendalian berkala dan rutin laporan SPIP.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana Aksi untuk Triwulan berikutnya adalah melanjutkan pengumpulan bahan laporan SPIP dan membuat draf laporan pengendalian berkala dan rutin laporan SPIP.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen).

IK 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24.

Tabel 47. Capaian IK 18 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
	IK 18							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	94	-	-	-	94	-	90	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU tercapai melebihi target yaitu 120 (berdasarkan aplikasi kinerjaku) dari target.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I 2024 naik 11,3% jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Jika dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar untuk saat ini Capaian Triwulan tercapai hingga 133,33%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah komitmen pimpinan dan para pegawainya dalam memenuhi kelengkapan dokumen, keikutsertaan dan keaktifan dalam manajemen pengetahuan yang terstandar menggunakan aplikasi melalui laman kinerjakp.bitrix24.com

b. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat permasalahan

c. Solusi

Tidak terdapat Solusi karena tidak ada permasalahan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Setiap subkoordinator seksi memiliki aplikasi Bitrix yang kemudian diisi.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah melakukan publikasi bulanan di sosial media.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah melanjutkan publikasi bulanan di sosial media.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 18 Persentase Unit Kerja BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).

IK 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Denpasar.

Tabel 48. Capaian IK 19 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
-	80	-	-	-	80	133,33	80	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IK telah tercapai 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I 2023 maupun triwulan I 2024 tercapai 100 sehingga tidak terdapat peningkatan atau penurunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

D. Capaian Kinerja Triwulan I jika dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar adalah telah tercapai 100%.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah telah menuntaskan laporan hasil pengawasan (LHP) Itjen KKP.

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Dalam penyelesaian tersebut tidak menggunakan anggaran

G. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung koordinasi antar semua pimpinan dan staf dalam penyelesaian hasil pengawasan.

H. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan tindak lanjut jika terdapat temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai rekomendasi dengan status tuntas 100%.

I. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 19 Persentase

Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).

IK 20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Denpasar. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar dapat dihitung menggunakan rumus: (Jmlh tindaklanjut / Jmlh temuan) x 100%.

Tabel 49. Capaian IK 20 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023(%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	100	-	-	-	100	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, karena belum terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.

b. Analisis Kegagalan

Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, karena belum terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.

c. Solusi

Tidak dapat diberikan Solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Terdapat penanggung jawab penyelesaian temuan BPK

F. Kegiatan Pendukung

Tidak ada kegiatan pendukung pada IK tersebut.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan tindaklanjut jika terdapat temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)

IK 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang telah dibahas Bersama UPT dan Direktorat Lingkup DJPRL.

Teknik Menghitung:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Tabel 50. Capaian IK 21 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	80	-	-	-	30	-	72,5	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

d. Analisis Keberhasilan

Kegiatan efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Denpasar belum dapat dianalisis keberhasilan.

e. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat permasalahan

d. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dilakukan adalah dengan menugaskan pegawai di wilayah kerja untuk mendampingi penilaian dan melakukan monitoring evaluasi bantuan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja hingga Triwulan IV ini adalah monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah 2023

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2024.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%).

IK 22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Permen KP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun klasifikasi arsip mengacu pada Permen KP Nomor 9 Tahun 2021 tentang klasifikasi arsip, jadwal retesi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 51. Capaian IK 22 BPSPL Denpasar TW I

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 20	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023(%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	100	-	-	-	100	-	100	-

I. Capaian IK Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I, target IKU belum tercapai karena merupakan target IKU tahunan dan direncanakan akan tercapai pada triwulan IV. Untuk triwulan I yang ada hanya capaian progress kegiatan.

J. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

K. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan I hanya berupa progres kegiatan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

L. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

Kegiatan persuratan, tata usaha, dan pengarsipan secara rutin.

e. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat permasalahan.

f. Solusi

Tidak dapat diberikan Solusi karena tidak ada permasalahan.

M. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Terdapat pegawai yang bertanggung jawab pada bagian persuratan dan pengarsipan

N. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah persuratan dan pengarsipan secara rutin

O. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan kegiatan persuratan dan kearsipan secara rutin.

P. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 22 Persentase Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Denpasar dengan BPSPL Pontianak hingga Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 52. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan I 2024			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan I 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp. 000)	-	-	-	-	-	-
2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	-	-	-	-	-	-
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	-	-	-	-	-	-
4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	-	-	-	-	-	-
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	-	-	-	-	-	-
6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan I 2024			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan I 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	(Kelompok)						
7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	-	-	-	-	-	-
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan Penyadartahuan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penganganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	-	-	-	-	-	-
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	-	-	-	-	-	-
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	-	-	-	-	-	-
11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penaggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	-	-	-	-	-	-
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	-	-	-	-	-	-
13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	-	-	-	-	-	-
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	-	-	-	-	-	-
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	-	-	-	-	-	-
16	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	-	-	-	-	-	-
17	Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	1	1	100	1	1	100
18	Presentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	133,33	120	94	116,67	120

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan I 2024			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan I 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	120	80	100	120
20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	-	-	-	-	-	-
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	-	-	-	-	-	-
22	Nilai Pengawasan Internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	-	-	-	-	-	-

Dari hasil perbandingan terhadap 3 Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar yang memiliki target hingga Triwulan I terhadap capaian kinerja BPSPL Pontianak terhadap capaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang sama dapat disimpulkan bahwa pada 1 indikator kinerja (Presentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar) memiliki capaian lebih tinggi sedangkan pada indikator yang lainnya memiliki capaian yang sama.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 ini BPSPL Denpasar didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.07.2.477419/2024 sebesar Rp16.435.987.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp14.510.987.000,- dan PNPB Rp1.925.000.000,- termasuk dana blokir sejumlah Rp200.000.000,- yang berasal dari jenis belanja 52 (belanja barang) sehingga pagu bersih yang dapat digunakan sebesar Rp16.235.987.000,00.

Hingga akhir Triwulan I tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Denpasar adalah Rp3.357.819.665,- dengan persentase penyerapan 20,68%. Adapun realisasi anggaran BPSPL Denpasar secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2024

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar		16.435.987.000 <i>(diblokir 200.000.000)</i>	3.357.819.665	20,68
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50.000.000	0	0
2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000	4.572.617	6,53
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000	20.637.069	5,36
2362.REA.003	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	200.000.000 <i>(diblokir keseluruhan)</i>	-	-
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	700.000.000	57.013.287	8,47
2362.REB.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	1.340.000.000	121.051.089	9,03
2362.UBA.001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180.000.000	14.427.314	8,02
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
4346.QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan	500.000.000	17.651.165	3,53

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	<i>Dampak Pencemaran</i>			
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				
2363.PBW.002	<i>Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut</i>	225.000.000	1.196.000	0,53
Perencanaan Ruang Laut				
2366.PBT.009	<i>Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut</i>	1.100.000.000	169.133.751	15,38
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				
2367.CAN.001	<i>Perangkat Pengolah Data dan Informasi</i>	90.170.000	0	0
2367.EBA.956	<i>Layanan BMN</i>	85.000.000	25.191.496	29,64
2367.EBA.957	<i>Layanan Hukum</i>	315.000.000	0	0
2367.EBA.958	<i>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>	25.000.000	1.337.500	5,35
2367.EBA.960	<i>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</i>	20.000.000	0	0
2367.EBA.962	<i>Layanan Umum</i>	146.826.000	24.616.924	16,77
2367.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	10.085.161.000	2.701.022.491	26,78
2367.EBB.951	<i>Layanan Sarana Internal</i>	313.830.000	87.364.850	27,84
2367.EBC.954	<i>Layanan Manajemen SDM</i>	220.000.000	38.682.298	17,58
2367.EBD.952	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	100.000.000	20.476.128	20,48
2367.EBD.953	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	85.000.000	16.334.660	19,22
2367.EBD.955	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>	185.000.000	34.819.026	18,82

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja IKU BPSPL Denpasar hingga triwulan IV tahun 2023 dinilai baik jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjaku yaitu sebesar 109,95% dengan uraian sebagai berikut :

1. IKU 1 Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp.000) (belum ada capaian)
2. IKU 2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Orang) (belum ada capaian)
3. IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) (belum ada capaian)
4. IKU 4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah) (belum ada capaian)
5. IKU 5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan) (belum ada capaian)
6. IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok) (belum ada capaian)
7. IKU 7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) (belum ada capaian)
8. IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) (belum ada capaian)
9. IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) (belum ada capaian)
10. IKU 10 Pemanfaatan air laut selain energi yang Identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) (belum ada capaian)
11. IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan) (belum ada capaian)
12. IK 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (belum ada capaian)
13. IK 13 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (belum ada capaian)
14. IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai) (belum ada capaian)

15. IK 15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) (belum ada capaian)
 16. IK 16 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (belum ada capaian)
 17. IK 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) (1 Dokumen)
 18. IK 18 Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) (120%)
 19. IK 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) (120%)
 20. IK 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%) (belum ada capaian)
 21. IK 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%) (belum ada capaian)
 22. IK 22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai) (belum ada capaian)
- Capaian kinerja BPSPL Denpasar seluruhnya mendukung capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan rapat evaluasi kegiatan dan memperbarui capaian setiap bulan;
2. Mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang membutuhkan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar

Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	1.	Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp.000)	950.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Orang)	160
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10.	Pemanfaatan air laut selain energi yang Identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94

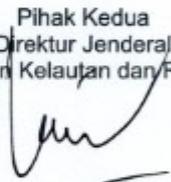
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	80
		22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	70

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.940.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	500.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	225.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.670.987.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024		16.435.987.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa



Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I
Tahun 2024